

Quo Vadis ASEAN

Andi Muhammad Sadli SE,SS.,M.Si



QUO VADIS ASEAN

© 2021 PPM STIE Mulia Pratama

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

viii +166 hlm.; 14,6 x 21 cm

ISBN 978-623-96930-0-8

Penulis : Andi Muhammad Sadli
Sambutan :
Prolog :
Editor & Copy Editor : Andi Muhammad Sadli, S.E., M.Si.

Cetakan Pertama : Juli 2021

Diterbitkan oleh:

PPM STIE Mulia Pratama

Jl. H.M. Joyomartono, Kav. 5 Kota Bekasi

Seri Buku Ekonomi Internasional
Benchmarking European Union

QUO VADIS ASEAN

Andi Muhammad Sadli

Dilarang mereproduksi atau memperbanyak seluruh atau sebagian dari buku ini dalam bentuk atau cara apa pun tanpa izin tertulis dari Penerbit.

©Hak cipta dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

All Rights Reserved

QUO VADIS ASEAN

Andi Muhammad Sadli

PPM STIE MULIA PRATAMA

BAGIAN 1

Belajar dari Krisis Yunani 2008

Lebih dari 10 tahun lalu, sekitar tahun 2008, ekonomi dunia mengalami banyak tekanan karena terjebak dengan utang (debt-trap). Demikian pula, kondisi perekonomian negara-negara di kawasan Eropa mendapat tekanan yang berat terutama dari sektor keuangan pemerintah yaitu berupa defisit anggaran yang relatif melebar dan beban hutang yang meningkat. Penggunaan hutang yang tidak efisien dan tidak terarah semakin memberi tekanan terhadap anggaran pemerintah. Tekanan fiskal tersebut berdampak melemahnya ketahanan ekonomi beberapa negara Eropa, termasuk Yunani serta berkurangnya kesempatan kerja.

Krisis keuangan yang dialami Yunani maupun beberapa negara di Uni Eropa memiliki kemungkinan akan semakin dalam dan dapat menjangar menjadi krisis keuangan di seluruh Eropa maupun Global (*contagion effect*). Gejala ini terlihat dari kemungkinan gagal bayar (*default*) negara-negara Eropa serta keterkaitan antar sektor perbankannya yang erat dan kompleks.

Sebagai episentrum terjadinya krisis di Eropa, Yunani perlu mempertimbangkan berbagai hal untuk memulihkan perekonomian domestiknya termasuk mengikuti paket pemulihan ekonomi Uni Eropa (UE).

Pada Tahun 2010, Yunani mengikuti mekanisme dan dukungan dari International Monetary Fund (IMF) dan Uni Eropa untuk melaksanakan kebijakan ekonomi yang ketat dan mengurangi efek negatif dari fundamental ekonomi UE. Selain itu, Yunani harus mengoreksi diri dan memperbaiki fondasi perekonomian melalui disiplin fiskal dan meningkatkan daya saing.

Krisis utang Negara-negara yang tergabung dalam zona euro adalah suatu tantangan baru dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat

bank sentral. Selain karena krisis Eropa belum berhenti sampai sekarang, krisis zona euro juga merupakan eksperimen penting dalam penyatuan mata uang tunggal. Krisis utang Eropa menimbulkan pertanyaan bahwa homegenitas Eropa bukan menjadi jaminan bagi kesuksesan fase unifikasi moneter (Jackson, 2010).

Permasalahan zona euro yang diawali dari Yunani sudah diperkirakan sebelumnya. Ekonom seperti Reinhart dan Rogoff (2001) telah memperingatkan bahwa zona euro di masa depan akan bermasalah karena lemahnya disiplin fiskal pemerintah Yunani. Dimana jauh sebelum Yunani menjadi pengguna euro pada tahun 2001, utangnya telah mencapai 100 persen GDP-nya, tertinggi di zona euro.

Potensi perpecahan zona euro sudah ada sebelumnya karena tidak adanya mekanisme untuk secara langsung menalangi negara anggotanya yang sedang mengalami tekanan. Zona euro terpisah secara fiskal sehingga transfer fiskal dari negara yang tidak bermasalah ke negara yang sedang krisis tidak mudah dilakukan. Pembayar pajak di Jerman tidak rela menanggung dampak perilaku konsumtif orang Yunani (Eurostat, 2010).

Selama periode 2001-2009 perekonomian Yunani ditandai dengan tidak adanya ketidakseimbangan eksternal dan ekspansi fiskal yang tidak berkelanjutan. Sejak adopsi euro Tahun 2001 sampai 2008, Yunani mengalami defisit anggaran rata-rata 5% per tahun, dibandingkan dengan rata-rata zona euro 2%. Tahun 2009, defisit anggaran Yunani diperkirakan lebih dari 13% dari PDB, melewati batas 3% yang ditoleransi dalam kriteria konvergensi Traktat Maastricht (*Economic Outlook*, 2009).

Sebagai salah satu Negara anggota Uni Eropa, Yunani yang mengalami krisis sistem keuangan, membutuhkan dana yang cukup besar untuk melaksanakan reformasi sistem keuangan. Disamping berupaya menggali sumber pembiayaan dalam negeri, pemerintah

Yunani tetap perlu menjaga sumber pembiayaan luar negeri, salah satunya adalah Penanaman Modal Asing Langsung (*foreign direct investment=FDI*).

Investasi Asing Langsung (FDI) di Yunani di mulai sejak awal 1950-an, dengan tujuan untuk menghidupkan kembali dan memperluas basis industri di negara itu. Tingkat pertumbuhan FDI Yunani positif sepanjang 40 tahun terakhir, dan paling tinggi pada periode 1974-75 dan 1980-84. (Bank of Greece, 1998).

Lebih lanjut, investasi langsung asing (FDI) di Yunani meningkat lebih dari dua kali lipat pada Tahun 2004 dibandingkan dengan Tahun 2003. Laporan United Nations Conferences on Trade and development (UNCTAD) arus masuk FDI ke Yunani adalah \$ 1.351 miliar merupakan yang terbaik kedua sejak 1990, tahun 2003 \$ 661.000.000 dan \$ 50 juta pada tahun 2002.

Banyak fakta memberi petunjuk bahwa peranan FDI dapat diandalkan dalam masa krisis karena relatif tidak terpengaruh oleh kondisi makro ekonomi yang bersifat jangka pendek.

Pada situasi perekonomian yang stabil, *foreign direct investment* sangat dipengaruhi variabel-variabel makro ekonomi tertentu. Tolentino (2010) menyimpulkan bahwa ada hubungan antara faktor-faktor makro ekonomi tertentu dengan aliran FDI. Beberapa faktor makro ekonomi ini sangat terkait dengan keterbukaan perekonomian domestik terhadap perekonomian global, perbedaan *interest rate*, dan perbedaan nilai kurs.

Laporan Pembangunan Manusia Tahun 2010 menyebutkan bahwa Yunani termasuk Negara maju dengan standar hidup yang tinggi, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah peringkat ke-22 di dunia. Menurut data Eurostat 1991, Produk Domestik Bruto (PDB) perkapita dengan paritas daya beli di atas rata-rata negara UE lainnya. Namun

demikian, ekonomi Yunani menghadapi masalah yang signifikan yaitu tingkat pengangguran yang tinggi, birokrasi yang tidak efisien, penghindaran pajak dan korupsi.

Oleh karena itu, Yunani membutuhkan reformasi dan jalan keluar dari krisis yang terjadi saat ini. Namun demikian, reformasi struktural yang menyertai Yunani harus diikuti upaya rasionalisasi keuangan dengan menciptakan investasi termasuk aliran masuk FDI ke Yunani yang menguntungkan, dengan situasi dan lingkungan bisnis yang proinvestasi.

Lebih lanjut, Yunani membutuhkan reformasi dan sistem ekonomi yang terbuka agar stabilitas pembangunan jangka panjang dapat tercapai. Yunani dapat memulai perbaikan ekonomi dengan menarik investasi yang bersifat jangka panjang. Salah satu instrumennya adalah meningkatkan volume investasi asing langsung (FDI) ke Yunani. Keuntungan FDI adalah tidak terpengaruh oleh gejolak keuangan yang bersifat jangka pendek.

Penelitian ini akan mendeskripsikan apakah aliran investasi asing (FDI *inflows*) ke Yunani pada periode krisis dan sebelum krisis dipengaruhi oleh faktor-faktor makro ekonomi antara lain pendapatan perkapita, tingkat suku bunga, inflasi dan krisis keuangan itu sendiri. Di sisi lainnya, penelitian ini akan menganalisis pula dampak suatu krisis keuangan dalam suatu integrasi ekonomi dan politik (dimensi politik).

Suatu krisis dapat memberikan efek penularan kepada Negara tetangganya. Gande dan Parsley (2005) menyatakan bahwa situasi ketidakstabilan suatu pasar tertentu dapat memberikan efek penularan (*spillover effect*) kepada satu atau beberapa pasar lainnya (*Contagion risk*).

Dari kajian ekonomi dan politik, tesis ini difokuskan pada studi FDI inflows di Yunani baik dalam situasi krisis maupun dalam keadaan perkeonomian yang stabil. Dari sisi politik, studi difokuskan pada kelembagaan struktural Uni Eropa untuk melihat komitmen dan kebijakan Uni Eropa dalam menghadapi suatu krisis di satu Negara anggotanya baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri dan bagaimana Uni Eropa dan Yunani menempatkan suatu *forecast* (ramalan) yang secara rasional dapat diterima dan dapat diharapkan oleh semua pihak.

Dari sisi ekonomi, tesis ini akan memberikan bukti-bukti baru dalam memperkaya diskursus FDI di Yunani. Banyak penelitian tentang FDI suatu Negara yang melihat faktor – faktor yang mempengaruhi volume FDI dalam perekonomian yang stabil tetapi tidak dalam keadaan krisis seperti sekarang ini yang terjadi di Yunani.

Investasi asing langsung (FDI) adalah elemen penting bagi integrasi ekonomi, karena membuka kemungkinan untuk percepatan pertumbuhan, inovasi teknis dan restrukturisasi perusahaan, serta bantuan modal (Garibaldi et al., 2002 & Holland dan Pain, 1998). Dalam konteks UE, baik Negara lama maupun Negara baru yang bergabung akan lebih mendapatkan keuntungan secara ekonomi dari segi investasinya karena sebab dari suatu perluasan pasar.

2. BAGIAN KEDUA

ADA APA DENGAN INSVESTASI ASING LANGSUNG

Sebagai elusidasi, bagian ini diawali dengan terminologi *foreign direct investment* (FDI). Ditengahnya rekam jejak peneliti terdahulu tentang FDI, dilanjutkan dengan penjelasan atas jenis, tujuan dan motif investasi serta diakhiri dengan penjelasan tentang model krisis dalam zona euro. Model krisis dalam zona euro menjadi penekanan pada bagian kedua ini.

Investasi asing langsung (FDI) didefinisikan sebagai arus modal internasional dimana perusahaan dari suatu negara mendirikan atau memperluas perusahaannya di negara lain. Investasi asing langsung ini melibatkan bukan hanya pemindahan sumber daya tetapi juga pengendalian (*control*). Perusahaan yang didirikan di negara tempat investasi memiliki kewajiban finansial kepada induk perusahaan karena merupakan bagian dari struktur organisasi yang sama **(Krugman, 1997)**.

Pada dasarnya investasi merupakan pembentukan modal yang mendukung peran swasta dalam perekonomian. Menurut Harrod Domar, dalam mendukung pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi-investasi baru sebagai stok modal seperti penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing.

Mengacu pada Model Harrod-Domar yang menjelaskan pentingnya peranan investasi di dalam proses pertumbuhan ekonomi, khususnya mengenai dampak ganda yang dimiliki investasi, seperti (1) investasi dapat menciptakan pendapatan, dan (2) investasi membesarkan kapasitas produksi perekonomian dengan cara meningkatkan stok modal. Yang pertama disebut sebagai dampak permintaan, dan kedua disebut sebagai dampak penawaran investasi (Kasliwal, 1995).

Investasi langsung asing (FDI) adalah elemen penting bagi integrasi ekonomi, karena membuka kemungkinan untuk percepatan

pertumbuhan, inovasi teknis dan restrukturisasi perusahaan, serta bantuan modal (Garibaldi et al., 2002 & Holland dan Pain, 1998). Melalui FDI, modal asing dapat memberikan kontribusi yang lebih baik kedalam proses pembangunan (Mashayekhi dan Gibbs, 1999:33).

Penanaman modal asing dapat pula berperan dalam meningkatkan pendapatan mata uang asing melalui aktivitas ekspor oleh perusahaan multinasional (*Multinational Enterprise*) MNE. Yang juga penting, penanaman modal asing (PMA) tidak melahirkan utang baru. Selain itu negara penerima tidak perlu merisaukan atau menghadapi risiko manakala suatu PMA yang masuk negerinya ternyata tidak mendapatkan untung dari modal yang ditanamnya (Fennel dan Tyler, 1995: 2003).

Dalam konteks UE, investasi langsung asing (FDI) adalah elemen penting bagi integrasi ekonomi, karena membuka kemungkinan untuk percepatan pertumbuhan, inovasi teknis dan restrukturisasi perusahaan, serta bantuan modal (Garibaldi et al., 2002 & Holland dan Pain, 1998).

Panayotou (1998) menjelaskan bahwa FDI lebih penting dalam menjamin kelangsungan pembangunan dibandingkan dengan aliran bantuan atau modal portofolio, sebab terjadinya FDI disuatu negara akan diikuti dengan *transfer of technology, know-how, management skill*, resiko usaha relatif kecil dan lebih *profitable*. Dia menyebutkan bahwa lebih dari 80% modal swasta dan 75% dari FDI sejak tahun 1990 mengalir ke negara-negara dengan pendapatan menengah (*middle income countries*).

Penelitian Blomström dan Kokko (1997), memberikan bukti bahwa volume FDI dari suatu negara yang bergabung dengan UE meningkat signifikan baik intra UE maupun antar kelompok regional lainnya.

Irlandia mengalami peningkatan FDI yang nyata setelah Uni Eropa mengaksesinya pada tahun 1973.

Blomstrom dan Kokko menemukan pengaruh regionalisme terhadap arus FDI tergantung pada kesepakatan terhadap lingkungan kebijakan komersial dan keunggulan lokasional dalam negara yang berintegrasi. Pain (1996) menggunakan panel-data disagregasi untuk mengestimasi determinan investasi Inggris di Uni Eropa dan menemukan bukti dampak positif yang signifikan secara statistika dari EC-92 (*Single Market Program*) terhadap outflow FDI ke Negara EU lainnya, dan juga terjadi diversifikasi investasi dari Amerika Serikat.

Demikian pula dengan akses Spanyol ke Uni Eropa pada tahun 1986 berdampak pada tingginya arus masuk FDI yang dihasilkan dari proses integrasi Uni Eropa. Austria, Finlandia dan Swedia yang bergabung dengan Uni Eropa pada tahun 1995, menjadi Negara yang menarik bagi investor asing sebagai Negara tujuan penerima investasi. (Galego et al; 2002,p. 6.)

Beberapa studi empiris lainnya adalah (Apergis, Katrakilidis, 1998, Filippaios, Kottardi 2004, Psycharis Kokkinou 2004, Pantelidis, Nikolopoulos, 2008) menunjukkan bahwa Yunani memiliki kondisi yang mempersulit daya tarik investasi asing. Studi-studi ini menunjukkan bahwa pajak yang tinggi dan stabilitas ekonomi makro yang rentan gejolak yang mengakibatkan sulitnya mendatangkan investor.

Studi Bitzenis dkk. (2007) menunjukkan bahwa investor memilih Yunani, karena mereka menilai bahwa persyaratan dipenuhi dalam hal efisiensi pasar (ukuran) dan sumber daya. Literatur tentang FDI dimulai pada 1960-an dan 1970-an dengan Hymer (1960), Kindleberger (1969), dan Gua (1971). Dunning (1981) dengan eklektik teori FDI, menunjukkan bahwa internalisasi dapat menjelaskan pergerakan investasi.

Dunning menjelaskan hubungan antara kedekatan pasar luar negeri dan ekspor, atau kedekatan pasar luar negeri dan produksi baru (yaitu, apakah lebih baik untuk memindahkan produksi). Faktor ekonomi, seperti ukuran pasar, tingkat pertumbuhan, biaya tenaga kerja, keterampilan tenaga kerja, pendapatan per kapita, telah dianggap sebagai variabel penjelas dalam model-model ekonometrik.

Dunning (1993) menunjukkan tiga motif berinvestasi yang paling umum yaitu pencarian sumber daya, perluasan pasar dan efisiensi.

Pantelidis dan Nikolopoulos (2008), Jeon dan Rhee (2008), Maniam (2007), Skabic dan Orlic (2007), dan Rodriguez dan Pallas (2008) menjelaskan faktor penentu FDI yaitu ukuran pasar, biaya tenaga kerja, keterampilan kerja, keterbukaan, ekonomi makro dan stabilitas politik dan faktor lainnya. Lebih jauh, Pantelidis dan Nikolopoulos (2008) meneliti daya tarik FDI untuk Yunani periode 1976-2004. Studi ini memberikan kesimpulan bahwa ukuran pasar, kapasitas teknologi, daya manusia dan biaya tenaga kerja berjalan secara teoritis.

Studi ini mendeskripsikan beberapa hambatan terhadap daya tarik investasi seperti birokrasi, pajak yang tinggi, infrastruktur dan ketidakstabilan makroekonomi. Yunani disarankan untuk mengurangi birokrasi dan korupsi. Skabic dan Orlic (2007) menerapkan estimator efek tetap dari periode 1993-2005 bagi negara-negara Eropa Timur dan Barat.

Rodríguez dan Pallas (2008) menggunakan data panel untuk menentukan FDI di Spanyol selama periode 1993-2002. Rodríguez dan Pallas (2008) menganggap bahwa modal manusia dan potensi ekspor merupakan hal yang sangat mendasar. Naude dan Krugell (2007), dan Alguacil, Cuadros, dan Orts (2008) menganggap bahwa investasi langsung asing adalah fenomena yang dinamis.

Beberapa peneliti telah melakukan kajian dengan pendekatan yang diperkenalkan Dunning selanjutnya dikembangkan menjadi model dengan variabel yang mewakili faktor-faktor utama yang mempengaruhi FDI.

Lebih Jauh Tentang FDI

Beberapa jenis FDI adalah sebagai berikut¹ :

1. FDI vertikal

FDI yang dilakukan secara vertikal menyangkut desentralisasi secara geografis dari aliran produksi perusahaan. Perusahaan akan melakukan kegiatan produksi di negara-negara yang memiliki biaya tenaga kerja yang rendah, kemudian hasil produksi di negara tersebut akan disalurkan kembali ke negara induk. Misalnya suatu produk yang proses produksinya capital-intensive akan memindahkan proses produksinya ke negara-negara yang kaya akan modal.

2. FDI horizontal

FDI yang dilakukan secara horizontal akan memproduksi barang yang sama di beberapa negara. FDI jenis ini memiliki motivasi untuk mencari pasar yang baru. Keuntungan dari FDI dengan jenis ini adalah efisiensi di dalam biaya transportasi, karena tempat produksi yang ada menjadi lebih dekat dengan konsumen.

FDI juga dapat dibedakan menjadi jenis greenfield dan akuisisi. Investasi dengan jenis greenfield akan membangun unit produksi yang baru sementara FDI dengan tipe akuisisi akan membeli sebagian kepemilikan dari perusahaan yang sudah ada sebelumnya. Sementara itu, FDI juga dapat dibedakan berdasarkan motivasi yang melatar belakangi investor asing, yaitu:

3. *Resource seeking*: Investasi dilakukan untuk mencari faktor-faktor produksi yang lebih efisien di negara lain dibandingkan dengan menggunakan faktor produksi di dalam negeri yang lebih mahal.
4. *Market seeking*: Investasi yang dilakukan dengan tujuan mencari

¹ Bjorvatn Kjetil, Hans Jarle Kind, The Role of FDI in Economic Development.

pasar yang baru atau mempertahankan pasar yang lama. Strategi ini dapat juga dilakukan sebagai strategi pertahanan². Investasi dengan latar belakang untuk mencari pasar direalisasikan di dalam bentuk merger dan akuisisi³.

5. *Efficiency seeking*: Investasi dimana perusahaan berusaha untuk meningkatkan efisiensinya dengan mengambil keuntungan dari *economic scale* dan *scope*. Tipe FDI ini banyak digunakan di negara-negara berkembang.

Pilihan investor asing untuk menanamkan investasinya dalam bentuk FDI dibanding modal lainnya di suatu negara dipengaruhi oleh kondisi dari negara penerima FDI (*pull factor*) yang dapat terdiri dari kondisi pasar, sumber daya, daya saing, kebijakan yang terkait dengan perdagangan dan industri serta kebijakan FDI itu sendiri. Selain itu juga kondisi dan strategi dari penanam modal asing (*push factors*) yang berinvestasi.

Minat investor asing untuk menanamkan dana dalam bentuk FDI menurut Dunning (1977, 1981) dapat didasarkan oleh karakteristik utama yaitu *ownership*, *location* dan *internalization advantages*. Pada dasarnya *ownership advantages* adalah keunggulan yang dimiliki oleh perusahaan tersebut, yang menjadikan perusahaan tersebut maju atau menonjol pada sektor-sektor tertentu. Keunggulan tersebut yang dimiliki secara internal oleh perusahaan tersebut, dapat dimanfaatkan baik di dalam negeri maupun di luar negeri, biasanya disebut *firm specific asset* yang terdiri dari *tangible assets* seperti barang modal dan mesin, serta *intangible assets* seperti *knowledge*, *organizational & entrepreneurial skill*, *access to market* dan teknologi. Sedangkan *location advantage* merupakan keunggulan yang dimiliki di daerah tersebut dan hanya dapat digunakan di daerah tersebut.

² Knickerbocker, F.T. *Oligopolistic reaction and multinational enterprise*. Boston. Division of Research Graduate School of Business Administration Harvard University.

³ Dunning, J. H. B. Kogut dan M. Blomstrom. *Globalization of firms and the competitiveness of nations*. Lund, Institute of Economic Research Lund University : Bromley : Chartwell-Bratt.

Namun pemakaian keunggulan tersebut terbuka untuk semua perusahaan, seperti tenaga kerja yang murah, sumber-sumber alam yang murah, iklim yang menunjang. Sementara internalization advantages adalah tindakan untuk menghindari adanya disadvantages ataupun kapitalisasi sumber-sumber daya alam yang disebabkan sistem harga di pasar dan sistem kebijakan pemerintah.

Investasi FDI merupakan *eksposure* jangka panjang perusahaan asing tersebut terhadap kondisi ekonomi dan politik dari *host country*, karenanya investor mementingkan komitmen pemerintah sehingga mereka yakin bahwa investasi yang mereka tanamkan aman dari eksploitasi dan profit dapat ditransfer ke luar negeri, potential dispute antara pemerintah *host country* dan perusahaan multinational dapat diselesaikan dengan cara yang baik dan efisien.

Dalam kaitan ini negara yang ekonomi, politik dan sosialnya stabil, memiliki kebijakan perdagangan bebas, serta kedekatan geografis dengan ekonomi yang besar dan sedang bertumbuh akan lebih menarik bagi investor asing.

Tujuan FDI

FDI yang dilakukan oleh negara-negara di dunia pada hakekatnya berawal dari pemikiran sebagai berikut⁴:

1. Ketidaksempurnaan pasar (Hymer 1976), yang mengemukakan bahwa FDI merupakan efek langsung dari pasar yang tidak sempurna.
2. Teori internalisasi (Rugman 1986), dimana FDI digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengambil keuntungan dari efisiensi internal host country.
3. Pendekatan eklektik (Dunning; 1988) dimana FDI digunakan untuk mengambil keuntungan ownership, internalisation, dan locational advantages.

Terdapat beberapa alasan mengapa investor menanamkan modalnya di luar negeri, selain untuk mencari pasar dan ekspektasi keuntungan yang lebih besar⁵. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh IMF, investasi-investasi asing yang dilakukan oleh 20 perusahaan multinasional terbesar di US disebabkan oleh motivasi untuk mencari return yang lebih besar.

Tujuan setiap FDI tidaklah sama, perusahaan investor tergerak oleh berbagai ragam alasan untuk berinvestasi di luar negeri. Mereka memiliki proses pengambilan keputusan dan prioritas yang berbeda – beda saat memilih sebuah lokasi investasi. Terdapat empat tujuan utama FDI (Foreign Direct Investment) yaitu:

1. Pencari sumber daya,
2. Pencari pasar,
3. Pencari efisiensi dan

⁴ Banga Rashmi, Impact of Government Policies an Investment Agreements on FDI Inflows to Developing countries : An Empirical Evidence, 2003.

⁵ The role of FDI in emerging market economies compared to other forms of financing : Past developments and implications for financial stability, Deutsche Bundesbank, 2003.

4. Pencari asset strategi.

FDI dapat memberikan beragam manfaat ekonomi dan lainnya untuk lokasi tuan rumah, manfaat ini termasuk meningkatkan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, dampak menguntungkan untuk investasi lokal, alih teknologi, membaiknya keterampilan buruh, meningkatnya ekspor, meningkatkan kebersaingan internasional dari perusahaan –perusahaan lokal dan meningkatnya persaingan domestik.

FDI kini memainkan peran penting dalam proses internasionalisasi bisnis. Perubahan yang sangat besar telah terjadi baik dari segi ukuran, cakupan, dan metode FDI dalam dekade terakhir. Perubahan-perubahan ini terjadi karena perkembangan teknologi, pengurangan pembatasan bagi investasi asing dan akuisisi di banyak negara, serta deregulasi dan privatisasi di berbagai industri. Berkembangnya sistem teknologi informasi serta komunikasi global yang makin murah memungkinkan manajemen investasi asing dilakukan dengan jauh lebih mudah.

Motif Investasi

Terdapat beberapa motif strategi mengapa perusahaan-perusahaan melakukan investasi ke luar negeri. Motif-motif tersebut antara lain:

1. Motif mencari pasar; perusahaan melakukan investasi keluar negeri awalnya di dorong oleh keinginan untuk memperoleh tambahan pendapatan dengan memasok barang produksinya ke pasar yang baru.
2. Motif mencari bahan baku; motif ini menjadi motif dominan yang kedua. Katagori bahan baku antara lain adalah minyak, barang-barang tambang maupun hasil hutan.
3. Motif mencari efisiensi produksi; hal ini di lakukan pa da Negara yang memiliki factor produksi yang lebih muarah relative pada negara lain.
4. Motif mencari teknologi dan kaehlian manajemen dengan beroperasi di luar negeri seperti perusahaan Jerman, Belanda, Jepang.
5. Motif mencari keamanan politis.

Lima motif diatas bukan merupakan hubungan yang saling menghilangkan.namun yang lebih penting adalah apakah investasi keluar negeri tersebut merupakan bentuk dari *proactive investement* atau *defensive investement*. Proactive investement didesain untuk meningkatakn pertumbuhan dan profitabilitas perusahaan, sedangkan defensive investement dilakukan untuk melindungi posisi perusahaan dalam persaingan.

Understanding The Euro Zone Crisis

Ada tiga klasifikasi krisis berdasarkan pengalaman beberapa negara. Secara garis besar model krisis dapat dikelompokkan menjadi a) *First Generation Model* b) *Second Generation Model* dan c) *Third Generation Model*. (Krugman, 1979 dan Flood&Garber, 1984). Pada bagian ini, penulis akan memaparkan dua jenis krisis yang teridentifikasi memiliki kemiripan dengan krisis yang terjadi di zona euro yaitu *first generation model* dan *second generation model*.

Pertama, *First Generation Model* (FGM) sering disebut sebagai *exogeneous policy model* (Krugman, 1979 dan Flood&Garber, 1984). Model krisis ini lebih menitikberatkan kepada ketidak konsistenan kebijakan fiskal, moneter dan nilai tukar. Penyebab utama terjadinya krisis model ini adalah serangan para spekulator terhadap nilai tukar suatu negara yang memaksa negara tersebut mengubah nilai tukar mata uangnya (*Special Report: Bank Indonesia, 2010*).

Ada beberapa hal yang menjadi dasar analisis dari model ini antara lain ; *single tradable goods, full employment, small open economy, exogeneous output*, paritas daya beli dan agen ekonomi diasumsikan dalam kondisi *perfect foresight* serta memegang 3 jenis asset baik *domestic money, domestic bond* serta *foreign bond*. Asumsi lainnya adalah tidak ada bank komersial sehingga *money supply* adalah *monetary base*, nilai tukar *fixed*, *domestic credit* meningkat dengan laju yang tetap untuk membiayai defisit pemerintah. Kondisi inilah yang akan mempercepat runtuhnya nilai tukar mata uang domestik yang menganut *fixed exchange rate*.

Secara empiris *First Generation Model* (FGM) ditandai oleh membengkaknya defisit APBN suatu negara, pertumbuhan *money supply* yang berlebihan, cadangan devisa yang semakin terkuras, tingkat inflasi yang tinggi serta *over valued* dari nilai tukar mata uang domestik. Secara empiris FGM ini dapat menjelaskan fenomena krisis

yang terjadi di beberapa negara Amerika Latin tahun 1970 dan 1980-an.

Kedua, *Second Generation Model (SGM)* sering disebut sebagai *endogeneous policy model* atau *self fulfilling process*. Munculnya SGM merupakan jawaban terhadap fenomena krisis yang terjadi di Eropa dengan *European Exchange Rate Mechanism (ERM)* pada tahun 1992. Ketika itu antar negara-negara Eropa dalam kerangka *monetary union* berlaku *fixed exchange rate system* atau tepatnya *crawling peg system*.

Setiap mata uang mempunyai nilai tengah dan dimungkinkan untuk bergerak, 2,5%-3%, ke atas/bawah nilai tengahnya. Masing-masing Bank Sentral mempertahankan nilai tukarnya dalam *band* tersebut dengan cara menjual/membeli forex. Jika tidak berhasil, nilai tukar harus diubah. Mata uang di *pegged* terhadap Deutsche Mark (DM) Jerman yang dinilai mempunyai inflasi yang rendah dan stabil.

Keadaan berubah tahun 1992, dimana terjadi kekacauan pada tingkat *Exchange Rate Mechanism (ERM)* di zona euro. Akibat penyatuan Jerman, pertumbuhan ekonomi di Jerman meningkat sangat tinggi, akibatnya inflasi tinggi, dan Bundes Bank mengambil kebijakan untuk terus menaikkan tingkat bunga. Di sisi lain, negara-negara Eropa lainnya sedang mengalami kejatuhan perekonomian.

Untuk mempertahankan nilai tukar yang tetap dengan DM Jerman, negara lain dalam zona euro harus ikut menaikkan tingkat bunga. Namun, untuk kepentingan internal negara-negara ini harus menurunkan tingkat bunga untuk memerangi resesi. Oleh karena itu, muncul konflik kepentingan antara kepentingan internal dan eksternal dari masing-masing negara.

Beberapa contoh kasus yang menggambarkan terjadinya konflik kepentingan dari masing-masing negara anggota:

1. Finlandia mendevaluasi mata uangnya 13%.
2. Swedia menaikkan tingkat bunga dari 24% ke 75%.
3. Italia mendevaluasi mata uangnya 7%
4. Inggris kehilangan banyak cadangan devisanya dan menaikkan tingkat bunga dari 10% ke 15%.
5. Spanyol mendevaluasi mata uangnya 5%
6. Swedia dan Irlandia meningkatkan suku bunganya, masing-masing 300% dan 500%
7. Inggris, Italia, dan Spanyol menyatakan keluar dari ERM

Adapun asumsi dasar pelaksanaan SGM antara lain ; para anggota ERM ingin mempertahankan nilai tukar yang ada karena memberi manfaat, seperti laju inflasi yang rendah dan stabil, para anggota ERM melihat manfaat devaluasi, yaitu untuk mendorong produksi dalam negeri, keuntungan melakukan devaluasi semakin tinggi jika semakin banyak investor yang berpikir bahwa mata uang negara bersangkutan harus didevaluasi.

Krisis di zona euro adalah juga terkait dengan lemahnya sistem pengawasan negara atau lembaga yang berwenang (Uni Eropa) terhadap pelaksanaan transaksi keuangan di pasar modal beserta produk *derivatif*-nya.

Pada tabel 2 berikut ini, ditunjukkan Negara-negara yang pernah mengalami krisis.

Tabel 2. Negara dan Jenis Krisis

Nama Negara	Tahun Krisis	Keterangan
Amerika Latin	1980	
Meksiko	1994	Tequila crisis
Asia	1997	
Rusia	1998	Vodka crisis
Argentina	1999	
Amerika Serikat	2007	Financial crisis
Iceland	2008	
UK	2008	
Ireland	2008	Eurozone crisis
Greek	2010	Eurozone crisis
Portugal	2011	Eurozone crisis

Sumber : Drs.N. Dytianquin University Of Maastricht (MYEULINK)

Berdasarkan tipologi krisis, krisis zona euro diklasifikasikan sebagai krisis utang, secara khusus, krisis utang yang diakibatkan oleh borosnya sektor publik.

Krisis Yunani mempunyai *magnitude* yang hampir sama dengan pola kebijakan dalam merespon krisis Argentina (lihat tabel 3) di bawah ini. Di sisi lain, krisis Irlandia, Portugis dan Spanyol adalah mirip dengan krisis Asia.

Krisis Yunani dan Portugis memiliki kesamaan karena keduanya berasal dari sektor publik (defisit anggaran) dan keduanya melibatkan utang eksternal atau utang asing. Sementara itu, Inggris, Irlandia dan Spanyol mempunyai kesamaan karena krisisnya disebabkan oleh tingginya pinjaman sektor perbankan swasta untuk membiayai sektor real / perumahan (gelembung properti). Utang sektor swasta tersebut kemudian berdampak kepada utang sektor publik. Pada saat yang bersamaan Pemerintah harus menyelamatkan bank-bank komersial nasional yang juga terkena dampaknya atas tingginya pinjaman hipotek.

Di sisi lainnya, defisit anggaran di Spanyol dan Italia tidak berbahaya, namun demikian, berisiko untuk dapat menyebabkan krisis utang.

Utang publik eksternal (Portugal & Yunani) atau internal (Irlandia & Spanyol) adalah menjadi permasalahan. Utang luar negeri di luar kendali dan tidak dapat kontrol dan rentan terhadap spekulasi. Utang internal dapat dikendalikan dengan mencetak uang untuk melunasi hutang atau dalam kasus unifikasi moneter (Monetary Union) dapat diterapkan dengan pengenaan pajak atas pemegang obligasi pemerintah. Meningkatkan pasokan uang (money supply) dengan pencetakan uang baru berefek sama yaitu dapat dikenakan pajak atas melambungnya tingkat harga karena inflasi⁶.

⁶ Lihat : Myeulink “Unsustainable debt dynamics approach” (Fiscal Policy in Monetary Union); Dytianquin University of Maastricht :2010)

Tabel 3. Perbandingan Krisis Yunani dan Argentina dari Tahun Ke Tahun (Mirror Images)

Tahun	Argentina	Yunani	Tahun
1991	Quasi monetary union with USA	Monetary union with EU	2001
1994-1999	External shock: Brazil currency crisis	External shock: Global financial crisis	2008-2010
1999	De la Rúa becomes President	Papandreou becomes Prime Minister	2009
June 1999	Gov. Duhalde reported to consider debt restructuring	PM affirms Greek economy in intensive care	Nov 2009
Sept 2009	Fiscal responsibility law to reduce gov't spending	PM unveils radical reforms to cut deficit	Dec 2009
Feb 2000	National strike vs fiscal & labor reforms	Greek public sector workers strike vs pension reform and deregulation	Feb 2010
March 2000	IMF plan	IMF plan	May 2010
May 2000	Gov't announces \$1bn budget cut	Gov't presents draft budget to cut public spending	Oct 2010
March 2001	Rating agencies downgrade Argentina's long-term sovereign rating	Greek debt cut to junk status by Fitch after S&P and Moody's	Feb 2011

Mar 2001	New economic minister appointed	Cabinet reshuffle: new finance minister appointed	Jun 2011
July 2001	Unions call nationwide strike to protest austerity measures	Anti-austerity demonstrators gather outside parliament	Jun 2011
Jun 2001	Completion of mega-swap	French banks draft voluntary private rescue package	Jun 2011
Jul 2001	Argentina's Congress passes "Zero Deficit Law" to balance the budget by 4th quarter 2001	Greek parliament approves €28.6 billion of extra austerity measures	June 2011

Sumber: Drs.N. Dytianquin University Of Maastricht (MUEULINK)

Pentingnya FDI dalam Pertumbuhan Ekonomi

Dalam teori ekonomi pembangunan diketahui bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan investasi mempunyai hubungan timbal balik yang positif. Hubungan timbal balik tersebut terjadi oleh karena di satu pihak, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi suatu negara, berarti semakin besar bagian dari pendapatan yang bisa ditabung, sehingga investasi yang tercipta akan semakin besar pula. Dalam kasus ini, investasi merupakan fungsi dari pertumbuhan ekonomi.

Di lain pihak, semakin besar investasi suatu negara, akan semakin besar pula tingkat pertumbuhan ekonomi yang bisa dicapai. Dengan demikian, pertumbuhan merupakan fungsi investasi. Dalam konteks pembangunan nasional maupun regional (UE), investasi memegang peran penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi (Yonathan,2003).

Pembangunan dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak akan lepas dari peranan sumber dana dari luar negeri. Hal ini terjadi karena hampir semua negara baik Negara maju maupun Negara sedang berkembang tidak dapat mencukupi kebutuhan dana dari dalam negeri. Keadaan ini juga terjadi pada negara-negara yang terintegrasi secara ekonomi.

Masalah tipikal yang dihadapi negara yang dalam keadaan krisis adalah kelangkaan dana domestik (*saving gaps*) yang lazimnya ditutup dari dana luar negeri. Dana dari luar negeri dapat diperoleh dari hutang luar negeri atau penanaman modal asing (FDI).

Investasi diharapkan sebagai penggerak pertumbuhan perekonomian Indonesia. Karena terbatasnya dana yang dimiliki pemerintah, untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi maka peran investasi baik secara investasi dari luar negeri (FDI) maupun dari dalam negeri sangat diharapkan (Indah & Didit, 2005).

Secara umum investasi atau penanaman modal, baik dalam bentuk penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing (FDI) tergantung dari daya tarik daerah dan negara, membutuhkan adanya iklim yang sehat dan kemudahan serta kejelasan prosedur penanaman modal.

Laporan Bank Dunia mengenai iklim investasi (World Bank, 2005) mengatakan terdapat empat faktor terpenting dalam menarik investasi, antara lain stabilitas ekonomi makro, tingkat korupsi, birokrasi, dan kepastian kebijakan ekonomi.

Secara konseptual, penanaman modal asing atau investasi asing dianggap lebih menguntungkan karena tidak memerlukan kewajiban pengembalian kepada pihak asing seperti halnya hutang luar negeri, sebagai yang dilakukan Yunani selama ini.

Krisis Yunani adalah akumulasi defisit anggaran yang setiap tahunnya rata-rata mencapai sebesar 6% dari PDB selama 30 tahun. Yunani nampaknya tidak menerapkan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dalam kebijakan defisitnya, sehingga defisit anggaran mencapai dua kali lipat dari ketentuan *Uni Eropa* (UE) yang maksimum ditetapkan sebesar 3%. Sementara itu pasar obligasi di dalam negerinya juga masih sangat terbatas, untuk itu Yunani menjual surat utang Negara (SUN)-nya kepada investor di Prancis, Swiss, dan Jerman. Sebagai dampak akumulasi defisit, saat ini defisit Yunani mencapai 13,6% dari PDB.

Tingginya defisit Yunani di atas nampaknya efek dari lemahnya disiplin anggaran serta buruknya administrasi perpajakan. Hal ini tercermin dari pemborosan, korupsi, maupun manipulasi pembukuan.

Ketentuan batas maksimum defisit UE dilanggar dengan memanipulasi pembukuan. Dalam sistem pembukuan dan anggaran

berbasis kas, yang digunakan di Yunani, tidak mengantisipasi risiko fiskal karena dalam anggaran tidak memuat informasi mengenai pengeluaran *contingency*. Akibatnya pada saat SUN jatuh tempo pada April dan Mei 2010 ini, kewajiban pembayaran utang sebesar 20 miliar euro mengalami gagal bayar.

Selain itu, terdapat teori pertumbuhan baru yang dapat menjelaskan pentingnya FDI dalam pertumbuhan ekonomi. Teori ini memberikan kerangka teoritis untuk menganalisis pertumbuhan yang bersifat endogen. Pertumbuhan ekonomi merupakan hasil dari dalam sistem ekonomi. Teori ini menganggap bahwa pertumbuhan ekonomi lebih ditentukan oleh sistem produksi, bukan berasal dari luar sistem. Kemajuan teknologi merupakan hal yang endogen, pertumbuhan merupakan bagian dari keputusan pelaku-pelaku ekonomi untuk berinvestasi dalam pengetahuan. Peran modal lebih besar dari sekedar bagian dari pendapatan apabila modal yang tumbuh bukan hanya modal fisik saja tapi menyangkut modal manusia (Romer, 1994).

Akumulasi modal merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi. Definisi modal/kapital diperluas dengan memasukkan modal ilmu pengetahuan dan modal sumber daya manusia. Perubahan teknologi bukan sesuatu yang berasal dari luar model atau eksogen tapi teknologi merupakan bagian dari proses pertumbuhan ekonomi.

Dalam teori pertumbuhan endogen, peran investasi dalam modal fisik dan modal manusia turut menentukan pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Tabungan dan investasi dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan (Mankiw, 2000).

Berdasarkan teori pertumbuhan ekonomi di atas, maka penelitian ini mengasumsikan bahwa peranan FDI dalam suatu negara dapat dipakai sebagai salah satu cara mengatasi krisis keuangan, karena FDI bersifat jangka panjang.

Selain itu, pentingnya FDI dalam meningkatkan pertumbuhan dan menopang ekonomi dalam krisis zona euro (N. Dytianquin; University Of Maastricht) karena berbagai alasan antara lain sebagai berikut:

1. Utang luar negeri dapat dikoneversi menjadi investasi asing.
2. Negara debitur dapat membayar hutang dengan menggunakan mata uang lokal.
3. Pemotongan pembayaran kepada kreditor.
4. Investor asing dapat mengurangi utang dengan syarat menukarnya dengan 100% dari nilainya dalam mata uang lokal untuk investasi di perusahaan domestik. Cara ini dapat memicu inflasi dalam negeri untuk perusahaan yang menanamkan investasinya pada negara yang mengalami krisis. Namun demikian, akan tersedia lapangan pekerjaan baru yang pada gilirannya dapat meningkatkan GDP. Skema ini harus melibatkan sejumlah penjualan asset dalam negeri untuk investor asing.

Di sisi lainnya, proses integrasi Uni Eropa berdampak terhadap arus modal, perdagangan dan arus FDI di beberapa negara perifer Uni Eropa dan telah menjadi subjek penting untuk penelitian dan analisa empiris diantara para periset dan lembaga internasional. Simulasi dan analisa empiris tersebut memiliki dasar-dasar teori FDI dan menggunakan model yang berbeda, yang paling sering digunakan adalah model gravitasi.

Model gravitasi digunakan untuk menjelaskan arus bilateral FDI pada tingkat empiris dan menganggap sebagai faktor yang sangat penting untuk ukuran pasar, meskipun relatif dianggap kurang penting keberadaannya pada faktor produks⁷.

⁷ Serbu S.G., Op. Cit., Hal. 16

Dari segi lainnya, FDI dapat pula memberikan keseimbangan dalam neraca volatilitas neraca pembayaran (Bop), karena dapat meningkatkan impor yang diperoleh dari pembayaran deviden dan royalti di luar negeri (Vavilov, 2005).

Bagian **3**

Integrasi Asean & Uni Eropa

Integrasi

Pada bagian ini dijabarkan konsep integrasi baik dari sisi ekonomi maupun politik. Dilanjutkan dengan pembahasan atas pentingnya FDI dalam pertumbuhan ekonomi karena keduanya berkaitan erat satu dengan yang lainnya

Integrasi Ekonomi

Integrasi ekonomi dilandasi konsep memberikan manfaat ekonomi bagi negara-negara anggota maupun non-anggota. Prinsip dasar integrasi ekonomi adalah mengurangi atau menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara negara anggota dalam kawasan tertentu untuk dapat meningkatkan arus barang dan jasa dengan bebas ke luar masuk melintasi batas Negara masing-masing anggota, sehingga volume perdagangan semakin tinggi. Peningkatan volume perdagangan ini mendorong peningkatan produksi, peningkatan efisiensi produksi, peningkatan kesempatan kerja, dan penurunan *cost production* sehingga dapat meningkatkan daya saing produk dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Integrasi ekonomi juga mendorong dan memperlancar aliran investasi dari satu negara ke negara lainnya, baik di dalam negara-negara anggota integrasi maupun masuknya investasi dari negara bukan anggota ke negara-negara anggota integrasi. Hal ini menyebabkan terjadi peningkatan dan akumulasi investasi yang seterusnya mendorong peningkatan output negara dan kawasan serta peningkatan perdagangan antarnegara.

Jovanovic (2006) mendokumentasikan berbagai definisi integrasi yang berkembang dari Tinbergen, Balassa, Holzman, Kahneert, serta Menis dan Sauvart, dan kemudian menyimpulkan bahwa konsep integrasi ekonomi merupakan konsep yang cukup kompleks dan harus didefinisikan secara hati-hati. Secara umum integrasi ekonomi didefinisikan sebagai sebuah proses di mana sekelompok negara berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya.

United Nation Conference on Trade and Development. (UNCTAD) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai kesepakatan yang dilakukan untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan pergerakan faktor produksi lintas negara.

Pelkman (2003) mendefinisikan integrasi ekonomi sebagai integrasi yang ditandai oleh penghapusan hambatan-hambatan ekonomi (*economic frontier*) antara dua atau lebih ekonomi atau negara. Hambatan-hambatan ekonomi tersebut meliputi semua pembatasan yang menyebabkan mobilitas barang, jasa, faktor produksi, dan juga aliran komunikasi, secara aktual maupun potensial relatif rendah.

Ketika integrasi ekonomi berlangsung, terjadi perlakuan diskriminatif antara negara anggota dengan negara-negara bukan anggota integrasi di dalam pelaksanaan perdagangan, sehingga akan memberikan dampak kreasi dan dampak diversifikasi bagi negara-negara anggota.

Krugman (1991) memperkenalkan suatu anggapan bahwa secara alami blok perdagangan didasarkan pada pendekatan geografis yang dapat memberikan efisiensi dan meningkatkan kesejahteraan bagi anggotanya.

Solvatore (1997) menguraikan integrasi ekonomi atas beberapa bentuk :

1. Pengaturan Perdagangan Preferensial (*Preferential Trade Arrangements*) dibentuk oleh negaranegara yang sepakat menurunkan hambatan-hambatan perdagangan di antara mereka dan membedakannya dengan negara-negara yang bukan anggota.
2. Kawasan perdagangan bebas (*free trade area*) di mana semua hambatan perdagangan baik tariff maupun non tariff di antara negara-negara anggota dihilangkan sepenuhnya, namun

masingmasing negara anggota masih berhak menentukan sendiri apakah mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan yang diterapkan terhadap negara-negara nonanggota.

3. Persekutuan Pabean (*Customs Union*) mewajibkan semua negara anggota untuk tidak hanya menghilangkan semua bentuk hambatan perdagangan di antara mereka, namun juga menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara lain non-anggota.
4. Pasaran bersama (*Common Market*) yaitu suatu bentuk integrasi di mana bukan hanya perdagangan barang saja yang dibebaskan namun arus faktor produksi seperti tenaga kerja dan modal juga dibebaskan dari semua hambatan.
5. Uni Ekonomi (*Economic Union*) yaitu dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan fiskal dari masing-masing negara anggota di dalam suatu kawasan atau bagi negara-negara yang melakukan kesepakatan.

Hasil kajian Dollar (1992), Sach dan Warner (1995), Edwards (1998), dan Wacziarg (2001) menunjukkan bahwa integrasi ekonomi yang menurunkan atau menghilangkan semua hambatan perdagangan di antara negara-negara anggota, dapat meningkatkan daya saing dan membuka besarnya pasar pada negara anggota, dapat meningkatkan persaingan industri domestik yang dapat memacu efisiensi produktif di antara produsen domestik dan meningkatkan kualitas dan kuantitas *input* dan barang dalam perekonomian, produsen domestik dapat meningkatkan profit dengan semakin besarnya pasar ekspor dan meningkatkan kesempatan kerja.

Kasus integrasi perekonomian sebenarnya telah terjadi sebelumnya di beberapa wilayah dunia antara lain Amerika Utara, Uni Eropa dan Negara-negara Balkan. Bella Balasa menyatakan bahwa aktifitas

regionalism merupakan rangkaian proses yang cukup panjang yang terbagi menjadi beberapa tahapan sebagai berikut⁸ :

- a. Wilayah perdagangan bebas (*free trade area*).
- b. Penyesuaian aturan bea cukai (*customs union*).
- c. Pasar bersama (*common market*).
- d. Persatuan ekonomi (*common union*).
- e. Integrasi ekonomi total (*total economic integration*).

Istilah “integrasi” dalam ranah ekonomi pertama kali digunakan dalam konteks organisasi suatu industri sebagaimana dikemukakan oleh Machlup dalam Jovanovic dalam bukunya tahun 2006 (Arifin *et al*, 2008). Integrasi digunakan untuk menggambarkan kombinasi atau penyatuan beberapa perusahaan dalam suatu industry baik secara vertikal maupun horizontal. Kemudian, istilah integrasi ekonomi dalam konteks negara, yang menggambarkan penyatuan beberapa negara dalam satu kesatuan, diawali dengan kemunculan teori *Custom Union* (CU) Viner. Namun, batasan definisi yang baku tentang integrasi ekonomi di antara para ekonom belum juga ditemukan hingga saat ini.

Para ekonom mengembangkan berbagai definisi mengenai integrasi ekonomi dari berbagai sudut pandang yang berbeda satu sama lain. Di tengah perbedaan tersebut, Jovanovic dalam Arifin *et al* (2008) dengan ringkas telah mendokumentasikan berbagai definisi integrasi yang berkembang hingga saat ini, antara lain definisi dikemukakan oleh Tinbergen, Balassa, Holzman, Kahneert, serta Menis dan Sauvart. Tinbergen dalam Arifin *et al* (2008) membedakan definisi integrasi sebagai bentuk penghapusan diskriminasi serta kebebasan bertransaksi (*negative integration*) dan sebagai bentuk penyerahan kebijakan pada lembaga bersama (*positive integration*).

⁸ Bello, Walden, *De Globalisasi : Gagasan-Gagasan Ekonomi Dunia Baru*, Penerbit Pondok Edukasi, Yogyakarta, 2004, hal.27.

Pada sisi lain, Balassa dalam Arifin *et al* (2008) membedakan integrasi sebagai konsep dinamis melalui penghapusan diskriminasi di antara negara-negara yang berbeda, maupun dalam konteks yang statis dengan melihat ada tidaknya perbedaan dalam diskriminasi. Sementara Holzman dalam Arifin *et al* (2008) menyatakan integrasi ekonomi sebagai situasi di mana dua kawasan menjadi satu atau mempunyai satu pasar yang ditandai harga barang dan faktor produksi yang sama di antara dua kawasan tersebut. Definisi tersebut mengasumsikan tidak ada hambatan dalam pergerakan barang, jasa, dan faktor produksi di antara dua kawasan dan adanya lembaga-lembaga yang memfasilitasi pergerakan tersebut.

Kompleksitas integrasi ekonomi dan tingkatan intensitas integrasi yang berbeda mendorong munculnya analisis untuk membedakan tahapan integrasi ekonomi. Sebagaimana disebutkan oleh Pelkman dalam Arifin *et al* (2008), pendekatan tahapan integrasi yang digunakan secara luas adalah tahapan integrasi oleh Balassa. Balassa dalam Arifin *et al* (2008) membagi tahapan integrasi dalam enam tahap (Tabel 4).

Tabel 4. Tahapan Integrasi Balassa

Tahapan	Keterangan	Periode
<i>Preferential Trading Area</i> (PTA)	Blok perdagangan yang memberikan keistimewaan untuk produk-produk tertentu dari negara tertentu dengan melakukan pengurangan tarif namun tidak menghilangkannya sama sekali.	1958 – 1960
<i>Free Trade Area</i> (FTA)	Suatu kawasan di mana tarif dan kuota antara negara anggota dihapuskan, namun masing-masing negara tetap menerapkan tarif	1958 – 1993

	mereka masing-masing terhadap negara bukan anggota.	
<i>Customs Union (CU)</i>	Merupakan FTA yang meniadakan hambatan pergerakan komoditi antarnegara anggota dan menerapkan tarif yang sama terhadap negara bukan anggota.	1993 – 1999
<i>Common Market (CM)</i>	Merupakan CU yang juga meniadakan hambatan-hambatan pada pergerakan faktor-faktor produksi (barang, jasa, aliran modal). Kesamaan harga dari faktor-faktor produksi diharapkan dapat menghasilkan alokasi sumber yang efisien.	1999
<i>Economic Union</i>	Merupakan suatu CM dengan tingkat harmonisasi kebijakan ekonomi nasional yang signifikan (termasuk kebijakan struktural).	2002 – Sekarang
<i>Total Economic Integration</i>	Penyatuan moneter, fiskal dan kebijakan sosial diikuti dengan pembentukan lembaga supranasional dengan keputusan-keputusan yang mengikat bagi seluruh negara anggota.	

Integrasi Politik

Di sisi lainnya, Uni Eropa juga melakukan integrasi politik. Salah satu pemikir tentang integrasi Eropa adalah Jean Monnet. Inti pemikiran Monnet tentang integrasi Eropa adalah dengan pembentukan suatu Eropa yang terintegrasi, kekhawatiran akan bangkitnya dominasi Jerman dalam bidang industri yang menimbulkan rasa takut di Eropa akan segera hilang.

Pembentukan Eropa terintegrasi akan menciptakan kondisi yang sehat bagi industri Jerman, Prancis, dan Eropa yang memungkinkan dilakukannya ekspansi industri, di dalam kompetisi tanpa dominasi.

Suatu Eropa yang terintegrasi akan mampu menghapuskan praktek *dumping* dalam ekspor baja. Ini akan memberi peluang yang lebih luas kepada industri baja Prancis untuk melakukan ekspansi di Eropa tanpa ketakutan akan terjadinya praktek *dumping* tadi dan akan terbentuknya kembali kartel di Jerman sebelum Perang Dunia II.

Monnet memandang pentingnya fungsi organisasi dalam pembentukan Eropa. Fungsionalisme adalah teori paling tua yang membahas integrasi, dimana konsep dasarnya adalah membangun 'perdamaian secara bertahap' melalui organisasi transnasional yang fokus pada kedaulatan bersama dan kedaulatan masing-masing negara pada sebuah institusi supranasional (David Mitrany, Leonard Woolf, Norman Angell, Robert Cecil, G.D.H. Cole dan Jean Monnet).

Penelitian ini secara politik akan menjelaskan konsep integrasi Jean Monnet yaitu dengan menjelaskan pentingnya struktur dan fungsi Uni Eropa dalam mengatasi suatu krisis.

Lebih lanjut, integrasi Eropa adalah perwujudan kepentingan para aktor dengan mengusung ide kesamaan identitas, karenanya harus berintegrasi menjadi ide yang diakui tidak hanya kalangan elit tapi juga nongovernmental groups (NGO's) atau kelompok-kelompok

transnasional di tingkat regional maupun lokal, baik secara formal maupun informal.

Konsep Monnet dapat dilihat dari kebijakan penyatuan mata uang (euro) menjadi bukti bahwa kepentingan Uni Eropa bukanlah rangkaian preferensi yang baku melainkan produk dari identitas aktor-aktor Uni Eropa. Pada tabel 5 menunjukkan area integrasi dalam integrasi politik.

Tabel 5. Dimensi Integrasi Politik

	Integrasi Sektoral	Integrasi Vertikal	Integrasi Horisontal
Objek Integrasi	Ranah Kebijakan	Distribusi Kompetensi antara EU dan Negara Anggota	Yurisdiksi /teritorial Integrasi
Area Integrasi	Integration of new policy areas (Extension)	Tahapan Integrasi (Deepening)	Perluasan Wilayah-Akses (Enlargement)

Sumber: Rittberger, Berthold / Schimmelfennig, Frank, 2005: Integrationstheorien: Entstehung und Entwicklung der EU. In: Katharina Holzinger u.a.: Die Europäische Union. Theorien und Analysekonzepte. Paderborn: Schöningh, S. 22.

Komitmen negara-negara Eropa untuk mengintegrasikan sebagian (unifikasi politik) atau seluruhnya (unifikasi ekonomi) ke dalam "single state" dimulai dari kesepakatan mengikat Negara nasional melalui traktat demi traktat yang disempurnakan.

Perjalanan traktat Rome, Maastricht, Amsterdam, Nice dan traktat yang lebih baru yaitu traktat Lisbon adalah proses transfer kedaulatan. Unifikasi ekonomi eropa adalah transfer kedaulatan ekonomi secara mutlak. Kewenangan Negara nasional hampir tak ada lagi. Berbeda dengan unifikasi politik yang masih mengakomodir kepentingan nasional masing-masing Negara anggota. Dalam proses pengambilan keputusan, unifikasi ekonomi menggunakan *community methode* sedangkan unifikasi politik masih menggunakan *intergovernmental system*. Masa depan eropa lebih ditekankan pada akuntabilitas keuangan dan integraitas politik yang juga akuntabel.

Bagian **4**

Mengatasi Krisis, Mempertaruhkan Integrasi

Penyebab Krisis

Studi tentang FDI dengan variabel independen yang digunakan untuk menjelaskan variabel dependennya (FDI) berasal dari identifikasi krisis yang memiliki kedekatan dengan krisis ekonomi yang terjadi di Yunani antara lain termuat dalam kriteria konvergensi ekonomi Traktat Maastricht⁹.

Keterkaitan variabel independen yang digunakan dalam model yang disebutkan dalam kriteria konvergensi ekonomi Traktat Maastricht adalah didasarkan pada penjelasan pada bab tiga yang mengurai tentang model krisis dalam zona euro dan hubungannya dengan kepentingan FDI untuk tetap tumbuh dalam situasi krisis.

Gaspar (2001)¹⁰ berargumen kriteria riil adalah hasil (*outcome*) dari pencapaian kriteria nominal. Hal ini berarti saat tingkat inflasi stabil dikendalikan, dia akan berimbas positif kepada stabilitas nilai tukar, rendahnya suku bunga jangka panjang, defisit anggaran negara, dan utang pemerintah. Semua kondisi yang tercipta ini akan mendorong masuknya arus **investasi** sehingga pertumbuhan ekonomi akan positif. Pertumbuhan positif ini akan meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

⁹ Di dalam Traktat Maastricht terdapat kriteria nominal yang berisi sejumlah indikator ekonomi tertentu yang harus dipenuhi oleh masing – masing anggota di satu sisi. Di sisi lain, terdapat kriteria riil yang tidak dicantumkan dalam Traktat Maastricht yang dapat dijadikan suatu indikator sejauh mana kriteria nominal konvergensi ekonomi yang sudah dicapai para anggota akan mencerminkan kesejahteraan rakyat mereka dalam jangka panjang. Kriteria nominal konvergensi ekonomi itu adalah **tingkat inflasi, suku bunga jangka panjang**, dan nilai tukar (indikator moneter), serta defisit atau surplus anggaran negara dan utang publik (indikator fiskal).

¹⁰ P. Gaspar, “Real and Nominal Convergence of Pre-Accession Economies and the Choice of Exchange Rate Regime, “ECE and BUE, 2001,

<http://www.icegec.org/research/ACE/papers/aceconvergence.pdf>.

Terlalu ekonometrik

Meskipun buku disaripatikan dari penelitian menggunakan *software econometricviews* dengan *Ordinary Least Square* (OLS) atau metode kuadrat terkecil biasa yang merupakan metode yang paling populer untuk menyelesaikan masalah hitung perataan.

Model OLS adalah suatu model yang melihat hubungan antar dua variabel. Salah satu variabel menjadi variabel bebas (Independent variable) dan variabel yang lain menjadi variabel terikat (Dependent variable).

Data yang digunakan adalah data *time series* (data runtun waktu) periode tahun 1981-2010 (data tahunan).

Jenis data yang digunakan dalam kajian ini adalah data sekunder yang diperoleh dari berbagai lembaga dan instansi, antara lain berasal dari World data Bank, *World Financial Report-UNCTAD*, serta beberapa laporan resmi tentang data-data yang mendukung dan berhubungan dengan penelitian ini.

Berdasarkan penelitian empiris terdahulu antara lain oleh Pantelidis dan Nikolopoulos (2008), Jeon dan Rhee (2008), Maniam (2007), Skabic dan Orlic (2007), dan Rodriguez and Pallas (2008) menjelaskan faktor-faktor determinan dari FDI yaitu ukuran pasar(market size), upah rata-rata pekerja (labour costs), tenaga kerja berpendidikan (labour skills), keterbukaan (openness risk), stabilitas makro ekonomi dan politik (macroeconomic and political stability) dan faktor-faktor lainnya.

Faktor lainnya adalah modal ilmu pengetahuan (Markusen, 2001), modal sumber daya manusia (Sun et al., 2002), persamaan bahasa dan level kebudayaannya (Dunning, 1981).

Metode pengumpulan dan sumber data ditunjukkan pada tabel 6 berikut ini:

Tabel 6. Sumber Data dan Pengumpulan Data

Data	Sumber Data	Pengumpulan Data
<i>Foreign Direct Investment</i>	World dataBank	Langsung
GDP Yunani	World dataBank	Langsung
Suku Bunga Yunani	World dataBank	Langsung
Volume Perdagangan Yunani	World dataBank	Langsung
Inflasi Yunani	World dataBank	Langsung
<i>Dummy Crisis</i>	Diolah	Langsung

Menurut penelitian ini yang membangun spesifikasi model untuk mengetahui variabel yang mempengaruhi FDI di Yunani selama periode krisis yang digunakan adalah sebagai berikut:

FDI Yunani	= f (Market Size, Interest Rate, Openness, Inflation, Dummy Crisis) (4.1)
FDI	= f (GDP, Interest Rate, Trade, Inflation, Dummy Crisis) (4.2.)
Y	= f (X ₁ , X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅) (4.3.)
Log Y	= f (X ₁ , X ₂ , X ₃ , X ₄ , X ₅) (4.4.)

Keterangan:

FDI(dependent variable) = Foreign Direct Investment inflows Yunani

Market Size = Gross Domestic Product Percapita Yunani

Interest Rate = Suku bunga Yunani

Openness = Rasio ekspor terhadap GDP (Nilai Ekspor Total) Yunani

Inflation = Tingkat inflasi di Yunani

Dummy Crisis = *Dummy* variabel krisis untuk melihat pengaruh krisis ekonomi, nilai 0 untuk periode stabil (1981-2005) dan nilai 1 untuk periode krisis (2006-2010)

Spesifikasi model persamaan di atas merujuk pada beberapa penelitian tentang FDI sebelumnya, seperti terlihat dalam tabel 7 di bawah ini:

Tabel 7. Studi sebelumnya tentang relasi FDI dan beberapa variabel independen

Variabel	Denotasi	Studi Sebelumnya	Relasi dengan FDI
<i>Market size</i>	<i>GDP per capita</i>	Pantelidis, Nikolopoulos, 2008, Naudé, Krugell, 2007, Maniam, 2007	<i>positive sign.</i>
<i>Openness trade</i>	<i>exports/GDP ratio.</i>	Pantelidis and Kyrkilis (1997), Skabic, Orlic (2007)	<i>positive sign.</i>
<i>Taxes</i>	<i>taxes levels</i>	Psycharis and Kokkinou (2004) and Pantelidis and Nikolopoulos (2008) reported that the Greek case has a high taxation	<i>negative sign</i>
<i>Inflation,</i>	<i>inflation rate</i>	(Naudé, Krugell, 2007). (Apergis, Katrakyidis, 1998, Filippaios, Kottaridi, 2004) show that Greece has some problems of macroeconomic stability, which discourages the investors.	<i>negative sign</i>
<i>Real wages</i>	<i>real wages</i>	Pantelidis and Nikolopoulos (2008), Pantelidis	<i>negative sign</i>

		and Kyrkilis (1997) found a correlation between labour costs and FDI.	
--	--	---	--

Krisisi Eropa, FDI atau Perangkap Utang ?

FDI dalam konteks krisis Eropa adalah hal yang baru, namun demikian, FDI hadir sebagai tantangan yang baru pula. Teori FDI terbukti tidak cukup memberikan penjelasan sehingga analisa empiris perlu dilakukan untuk menemukan penjelasan yang tidak dijelaskan oleh teori-teori tersebut.

Oleh karena itu, FDI harus dibuktikan lebih lanjut dan mengingat kepentingannya sangat besar bagi negara-negara di Eropa Barat dan Eropa Timur (Brenton P., DiMauro F., Lucke M dalam Integrasi Ekonomi dan FDI).

Faktor-faktor yang mempengaruhi FDI dalam Negara Perifer Uni Eropa termasuk Yunani, berdasarkan beberapa analisa empiris adalah sebagai berikut;

- a. Indikator makroekonomi seperti GDP atau GDP per kapita dari negara tuan rumah (host country). GDP sangat relevan untuk pembangunan ekonomi negara dan terbukti menjadi penentu yang sangat penting untuk arus FDI. Studi-studi tertentu pada Eropa Tengah dan Timur¹¹ misalnya, membuktikan ada dua hubungan yang berlawanan masing-masing antara indikator makroekonomi dan FDI. Terdapat relasi positif antara GDP dan FDI akan tetapi menjadi suatu hubungan yang negatif antara GDP per kapita dengan FDI, sementara itu studi-studi¹² lainnya

¹¹ Brenton P., DiMauro F., Lucke M, Integrasi Ekonomi dan FDI: sebuah analisa empiris pada Investasi Asing di Uni Eropa dan di Eropa Tengah serta Eropa Timur (1998), Kiel Working Paper No.890, Institut für Weltwirtschaft an der Universität Kiel, halaman 6, dapat diakses di http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=139908

¹² Gorg H., Greenaway D., Adakah sebuah potensi untuk perkembangan-perkembangan pada FDI bagi negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur mengikuti pencapaian Uni Eropa? (2002), Makalah Penelitian 2002/31, Pusat Leverhulme, dapat diakses di http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=410813

menunjukkan dampak positif pada kedua indikator arus FDI, korelasi positif yang sama antara dua indikator makro ekonomi dan arus FDI yang ditegaskan oleh beberapa analisa empiris lainnya¹³. Temuan-temuan penting lainnya adalah Bevan¹⁴ yang ditemukan melalui analisa empiris bahwa GDP dari negara tuan rumah mempunyai pengaruh signifikan terhadap arus FDI, tetapi adanya potensi yang besar pada eksploitasi skala ekonomi.

- b. Jarak antara negara investor asing dan negara dimana investasi tersebut di arahkan. Jarak adalah salah satu elemen yang mempengaruhi biaya transportasi dan analisa paling empiris terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap arus¹⁵ FDI. Akan tetapi, ada studi yang tidak menemukan perannya menjadi signifikan, yaitu salah satu studi yang telah dilakukan oleh Resmini¹⁶. Hasil-hasil empirisnya menunjukkan bahwa yang mempengaruhi arus FDI adalah perbedaan gaji yang diterjemahkan sebagai biaya rendah tenaga kerja adalah lebih penting bagi investor asing, diikuti dengan ukuran pasar negara tuan rumah, tingkat keterbukaan ekonomi serta tahap proses transisi sebagaimana yang dialami oleh Yunani dalam konteks Uni Eropa.
- c. Tingkat Inflasi. Inflasi dapat didefinisikan sebagai kenaikan tingkat harga-harga umum atau harga rata-rata yang

¹³ Serbu S. G., Arus FDI menuju CEEC's: sebuah analisa pada kinerja Rumania, Hungaria dan Slovenia (2005), Universitas Orleans, Perancis dan Universitas "Babes-Bolyai", Cluj-Napoca, Rumania, hal. 11, diakses di http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=873474

¹⁴ Bevan Alan, Estrin Saul, Penentu-penentu FDI dalam Transisi Ekonomi (2000), William Davidson Institut Makalah Kerja 342, dapat diakses di <http://www.wdi.umich.edu/files/Publications/WorkingPapers/wp342.pdf>

¹⁵ Serbu S. G., op. cit, hal. 19

¹⁶ Resmini L., Penentu-penentu FDI dalam CEEC's: Bukti dari Pola Sektoral (1999), Makalah Diskusi LICOS No.83/1999, hal. 22-25, diakses pada <http://www.econ.kuleuven.ac.be/licos/DP/DP1999/LICOSDP83.pdf>

berlangsung terus-menerus dengan laju yang tidak kecil (Ackley, 1961). Inflasi memengaruhi investasi, walaupun secara tidak langsung. Ketika terjadi inflasi maka harga-harga pada umumnya akan mengalami kenaikan, termasuk harga faktor produksi. Ketika harga-harga faktor produksi meningkat, investor cenderung akan mengurangi investasinya. Menurut teori aliran klasik, inflasi terjadi apabila kuantitas uang bertambah, dan inflasi berhenti apabila kuantitas uang distabilisasi. Dalam hal ini, tingkat harga sangat bergantung secara langsung dengan kuantitas uang; sedangkan menurut Keynes suatu perekonomian dapat mengalami inflasi walaupun kuantitas uang konstan (Ackley, 1961).

- d. Suku Bunga. Tingkat bunga menentukan jenis-jenis investasi yang akan memberikan keuntungan kepada pemberi modal (investor). Para investor hanya akan menanamkan modalnya apabila tingkat pengembalian modal dari modal yang ditanamkan (*return of investment*), yaitu berupa persentase keuangan netto yang diterima lebih besar dari tingkat bunga.
- e. Situasi Politik. Kestabilan politik suatu negara akan menjadi pertimbangan tersendiri bagi investor terutama investor asing, untuk menanamkan modalnya. Mengingat bahwa investasi memerlukan jangka waktu yang relative lebih lama untuk memperoleh kembali modal yang ditanam dan memperoleh keuntungan sehingga stabilitas politik jangka panjang akan sangat diharapkan oleh para investor.
- f. Biaya dan tingkat kualifikasi angkatan kerja. Relasi antara biaya tenaga kerja dan FDI tidak terlalu signifikan dan oleh karena itu, pentingnya variasi – FDI dari sektor ke sektor. Termasuk dalam penelitian ini, menunjukkan adanya variasi yang diukur dalam menentukan faktor determinan terhadap FDI. Hal ini dapat dijelaskan oleh fakta bahwa tenaga kerja dengan biaya rendah

tidak selalu berarti mengurangi biaya produksi dan hal ini terutama terlihat ketika produktivitas tenaga kerja rendah¹⁷. Tingkat kualifikasi tenaga kerja dan kepentingannya sebagai penentu FDI secara berbeda dibutuhkan dalam analisa empiris.

Angkatan kerja dianggap memenuhi syarat dalam beberapa studi jika memiliki pendidikan tersier¹⁸ sedangkan bagi yang lainnya pendidikan menengah sudah cukup¹⁹, kedua studi tersebut menunjukkan aspek yang signifikan dari faktor arus FDI.

Dampak dari perluasan Uni Eropa dapat dilihat dari bukti-bukti empiris di atas, yang menunjukkan bahwa ada hubungan antara anggota Uni Eropa dan arus FDI terhadap negara anggota Uni Eropa atau negara-negara kandidat Uni Eropa.

Negara anggota Uni Eropa cenderung lebih tertarik menerima arus modal dari negara Uni Eropa²⁰ lainnya dan lembaga Uni Eropa memainkan peranan penting dalam konfigurasi arus FDI dalam perspektif integrasi²¹.

¹⁷ Serbu S. G., *op. cit.*, hal. 14.

¹⁸ Gorg H., Greenaway D., Adakah sebuah potensi untuk perkembangan-perkembangan pada FDI bagi negara-negara di Eropa Tengah dan Eropa Timur mengikuti pencapaian Uni Eropa? (2002), Makalah Penelitian 2002/31, Pusat Leverhulme, dapat diakses di http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=410813

¹⁹ Carstensen K., Toubal F., Foreign Direct Investment in Central and Eastern European Countries: a dynamic panel analysis (2004), *Journal of Comparative Economic* 32 (2004) p. 3-22. Di akses pada <http://www.ifw-members.ifw-kiel.de/publications/foreign-direct-investment-in-central-and-eastern-european-countries-a-dynamic-panel-analysis/kap1143.pdf>

²⁰ www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W8Y-44015W9-

[2&_user=7302445&_coverDate=09%2F30%2F2001&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=6667](http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6W8Y-44015W9-2&_user=7302445&_coverDate=09%2F30%2F2001&_rdoc=1&_fmt=full&_orig=search&_cdi=6667)

²¹ Serbu S. G., *op. cit.*, p.11

Selain itu, Gorg²² menemukan peningkatan potensi FDI dalam proses integrasi Uni Eropa untuk beberapa negara Eropa Timur. Potensi tersebut berasal dari sektor manufaktur dan potensi yang lebih besar di sektor jasa.

Brenton²³ memperoleh hasil yang berbeda dalam analisa empirisnya dan hasil tersebut difokuskan pada tiga aspek utama.

Pertama, Faktor FDI pada negara perifer UE adalah nilai GDP per kapita tiap tahun. Brenton menemukan bahwa calon investor harus dirangsang oleh negara tuan rumah untuk meningkatkan volume FDI. Fakta ini yang menunjukkan pentingnya FDI dalam mengundang investor baru.

Kedua, studi ini menemukan tidak ada bukti bahwa peningkatan FDI di negara anggota Uni Eropa akan menyebabkan penurunan aliran FDI ke arah non-negara Uni Eropa.

Ketiga, integrasi Uni Eropa tidak memiliki dampak yang signifikan pada saham FDI sejumlah negara anggota baru. Temuan-temuan penting lainnya dari Bevan²⁴ adalah aliran FDI ke negara Eropa Timur dan Tengah terutama dipengaruhi oleh biaya buruh, ukuran pasar dari negara tuan rumah, risiko negara serta faktor-faktor gravitasi.

Hal mendasar lainnya adalah faktor Komisi Eropa mengenai kemajuan Uni Eropa (Komisi Eropa tentang Agenda 2000) akan berdampak langsung pada penciptaan FDI terhadap negara Eropa Timur dan Tengah.

²² http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=410813

²³ http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=139908

²⁴ Bevan A., op.cit., pp. 26-27

Bagian 5

Berdasarkan hasil analisis yang diperoleh pada Tabel 8 menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini baik. Hal ini dapat dilihat dari uji kriteria statistik dan ekonometriknya. Uji kriteria statistik dapat dilihat dari nilai R-squared, F-statistik, dan t-statistiknya.

Uji ekonometrika dapat dilihat dari hasil uji Autokorelasi, uji Heteroskedastisitas dan uji Multikolinieritas. Data yang digunakan juga telah diuji stasioneritasnya, yaitu tentang konstannya rata-rata dan varian observasi.

Tabel 8. Hasil Estimasi Koefisien Variabel Penduga

Variabel	Koefisien	t-Statistik	Probabilitas	Keterangan
C (Log Y)	-5.666450	-1.745329	0.1014	FDI
X1	-0.000174	-1.893661	0.0777***	GDP/cap
X2	0.184197	3.470736	0.0034*	Interest Rate
X3	0.086117	1.984212	0.0658***	Trade
X4	0.103529	2.068599	0.0563**	Inflation
X5	2.771873	2.906306	0.0109*	Dummy Crisis
R – squared = 0.566929			F – statistic = 3.927272	
Adjusted R – squared = 0.422572			Prob (F-statistic) = 0.017797	
Jarque – Bera = 4.720576			Prob = 0.094393	
Obs*R-squared = 5.244165			Prob = 0.154767	
Durbin Watson stat = 2.487821				

*significant 1%

**significant 5%

***significant 10%

Sumber: lampiran 2 (Hasil estimasi “equation” dengan software eviews 5.1)

Persamaan regresi yang dihasilkan pada tabel 8 di atas menggunakan semilog yaitu variabel dependen menggunakan logaritma dan variabel independennya tidak menggunakan logaritma. Model semilog digunakan agar persamaan menjadi linear.

Berdasarkan hasil estimasi di atas maka dapat disusun persamaan regresi investasi di Yunani dalam bentuk yang lebih sederhana, sebagai berikut :

Log FDI	= - 5.666 - 0.0001 *GDP	+ 0.1841*Int.Rate	
	(3.246638) (9.18E-05)	(0.053072)	
	+ 0.0861 *Trade	+ 0.1035*Inf	
	(0.043401)	(0.050048)	
	+ 2.771*DC		
	(0.953745)		(5.1.)
	n = 21	df = 21 - 5 = 16	

Berdasarkan tabel 8, nilai R-squared adalah sebesar 0,5669 (56,69 persen) menunjukkan bahwa keragaman dari variabel dependen yaitu penanaman modal asing di Yunani dapat diterangkan oleh variabel independennya yaitu Pendapatan perkapita (GDP), sukubunga dalam negeri, inflasi, volume perdagangan dan varibel dummy krisis sebanyak 56,69 persen, sisanya diterangkan oleh variabel lain di luar model.

Pengaruh bersama-sama antara variabel independen dengan variabel dependen secara keseluruhan dapat dilihat dari nilai probabilitas F statistik. Nilai probabilitas F statistik yang diperoleh sebesar 0,017797 yang lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan yaitu 0,5 (5 persen) memiliki arti bahwa dari hasil estimasi regresi minimal ada satu variabel independen yang memengaruhi variabel dependennya.

Signifikan atau tidaknya pengaruh setiap variabel independen secara individu terhadap variabel dependennya dapat dilihat dari nilai probabilitas t-statistik tiap variabel independennya. Variabel GDP Yunani, Suku Bunga Yunani, Volume Perdagangan Yunani, tingkat inflasi Yunani dan variabel *dummy* berpengaruh nyata terhadap penanaman modal asing (FDI) di Yunani. Hal ini dapat dilihat dari probabilitas yang lebih kecil dari taraf nyata yang digunakan, yaitu 5% dan 10%.

Secara teoritis telah diungkapkan bahwa salah satu metode pendugaan parameter dalam model regresi linear adalah *Ordinary Least Square* (OLS). Metode OLS berlandaskan pada sejumlah asumsi tertentu. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi yang pada prinsipnya model regresi linear yang dibangun sebaiknya tidak boleh menyimpang dari asumsi BLUES (Best, Linear, Unbiased, dan Estimator). Dalam pengertian lain, model yang dibuat harus terbebas dari penyimpangan asumsi yaitu adanya serial korelasi, normalitas, linearitas, heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

Model yang digunakan telah terbebas dari masalah asumsi OLS. Model ini memiliki *error* yang terdistribusi normal, hal ini dapat dilihat dari nilai probabilitas *Jarque-Bera* yang lebih besar dari taraf nyata yang digunakan yaitu ($0.094393 > 0,05$). Cara lainnya adalah untuk mendeteksi apakah residualnya berdistribusi normal atau tidak dengan membandingkan nilai *Jarque Bera* (JB) dengan X^2 tabel, yaitu:

- a. Jika nilai $JB > X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi tidak normal.
- b. Jika nilai $JB < X^2$ tabel, maka residualnya berdistribusi normal.

Analisis hasil output, bahwa JB sebesar 4.720576. Karena $4.720576 < 5,99$ maka dapat disimpulkan bahwa residual berdistribusi normal.

Selanjutnya, untuk mendeteksi adanya serial korelasi dengan membandingkan nilai X^2 hitung dengan X^2 tabel, yaitu:

- a. Jika nilai X^2 hitung $> X^2$ tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa model dari masalah serial korelasi ditolak.
- b. Jika nilai X^2 hitung $< X^2$ tabel, maka hipotesis yang menyatakan bahwa model dari masalah serial korelasi diterima.

Analisis hasil output, dimana $obs \cdot R$ squared (disebut juga X^2 hitung) sebesar 5.244165 X^2 dan X^2 tabel yang disesuaikan dengan jumlah lagnya (v) = 2 dan α = 5 % adalah sebesar 5.99. Dimana $5.244165 < 5.99$, maka dapat disimpulkan bahwa model bebas dari masalah serial korelasi diterima.

Data *time series* juga harus memenuhi asumsi bahwa tidak adanya autokorelasi. Pengujian terhadap adanya autokorelasi dapat dilihat dari besarnya Durbin Watson. Nilai Durbin Watson yang bebas terhadap autokorelasi adalah berkisar pada angka 2. Untuk membuat asumsi autokorelasi tercapai maka salah satunya adalah dengan memberikan *lag* terhadap *dependent* variabel sebagai variabel yang bebas.

Pada tabel 8 dapat pula dilihat nilai *Durbin-Watson* berkisar pada angka 2, yaitu sebesar 2.487821, hal ini berarti bahwa dalam model regresi yang digunakan tidak terjadi autokorelasi. Sedangkan untuk mendeteksi adanya heteroskedastisitas digunakan uji *white heteroscedasticity*.

Pengujian ini menghasilkan nilai Probabilitas *Obs \cdot R*-squared lebih besar daripada taraf nyata yang digunakan sebesar 5 persen ($0,154767 > 0,05$) sehingga dapat dikatakan bahwa model ini telah terbebas dari masalah heteroskedastisitas. Selain autokorelasi dan heteroskedastisitas, pengujian lain yang dilakukan adalah terhadap adanya multikolinieritas.

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel independen secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel dependent.

Koefisien determinasi digunakan untuk menguji *goodness-fit* dari model regresi yang dapat lihat dari nilai R Square. Ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat diukur dari *goodness of fit* suatu model persamaan regresinya.

Pengukuran *goodness of fit* tersebut dapat dilakukan melalui nilai statistik t, nilai statistik F dan koefisien determinasi. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Uji R^2 untuk mengetahui pengaruh krisis ekonomi (krisis keuangan) di Yunani dan faktor determinan lainnya yang mempengaruhi FDI di Yunani antara lain pendapatan perkapita, suku bunga bank, keterbukaan ekonomi tingkat inflasi dan *dummy* krisis.

Dapat dilihat melalui besarnya koefisien determinasi. Dari perhitungan nilai R Square adalah 0,56 yang berarti 56 persen FDI di Yunani dapat dijelaskan oleh kelima variabel independen di atas (Pendapatan perkapita, suku bunga bank, keterbukaan ekonomi dan tingkat inflasi serta situasi krisis), sedangkan sisanya yaitu 46 persen dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model. Koefisien determinasi (R^2) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat (dependen).

Nilai koefisien determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan

hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel-variabel dependen.

Secara umum koefisien untuk data silang (*cross section*) relatif lebih rendah karena adanya variasi yang besar antara masing-masing pengamatan, sedangkan data runtut waktu (*time series*) biasanya mempunyai nilai koefisien determinasi yang tinggi.

Pengolahan data *time series* dengan menggunakan OLS, harus memenuhi asumsi- asumsi dasar, yaitu meliputi homoskedastisitas dari tingkat kesalahan, tidak adanya multikolinieritas, dan tidak adanya autokorelasi. Sebelum dilakukan pengolahan data *time series*, maka dilakukan pengujian stasioneritas data dengan menggunakan metode *Augmented Dickey Fuller*.

Selanjutnya dilakukan pengujian untuk mengetahui, apakah terdapat hubungan yang kuat antara variabel independen. Hubungan dimaksud akan menyebabkan model yang dihasilkan menjadi kurang baik. Salah satu ciri munculnya multikolinieritas di dalam model adalah nilai *R-squared* yang tinggi dengan nilai *t* statistik yang menunjukkan tingkat signifikansi yang rendah. Di dalam melihat gejala multikolinieritas secara lebih konkrit, dapat dilihat dari matriks korelasi. Nilai yang lebih besar dari 0,8 menunjukkan tingkat keterkaitan antar variabel yang tinggi. Sementara untuk memenuhi asumsi homoskedastisitas di dalam varians tingkat kesalahan, dilakukan pengujian *White test* sehingga varians dari tingkat kesalahan memiliki tingkat yang sama.

Uji stasioneritas data digunakan untuk melihat apakah data mengandung akar unit atau tidak. Data *time series* dikatakan stasioner jika data tersebut tidak mengandung akar-akar unit (*unit root*) dengan kata mean, variance, dan covariant konstan sepanjang waktu. Pengujian akar-akar *unit root* dilakukan dengan metode

Augmented Dickey Fuller (ADF), yaitu dengan membandingkan nilai ADF statistik dengan Mackinnon critical value 1%, 5%, dan 10%.

Data dikatakan stasioner jika nilai ADF statistik lebih besar dari Mackinnon critical value 1%, 5%, dan 10% serta nilai probabilitasnya signifikan dibawah 10%. Jika ADF statistik lebih kecil dari Mackinnon critical value 1%, 5%, dan 10% serta nilai probabilitasnya diatas 10% (tidak signifikan) maka data dikatakan tidak stasioner.

Tabel 10. Hasil Uji Stasioner Data

No.	Variable	ADF test statistics (level)		ADF test statistics (I(1))	
		t statistic	Probability	t statistic	Probability
1	Log FDI	1.88	0.99	-10.22	0.00
2	GDP Percap	-1.01	0.73	-3.39	0.02
3	Interest Rate	-1.73	0.39	-6.60	0.00
4	Trade	-1.81	0.36	-4.75	0.00
5	Inflation	-2.05	0.26	-7.20	0.00
6	Dummy Crisis	-1.85	0.64	-5.21	0.00

Berdasarkan hasil pengujian unit root test pada tabel 10 di atas, diperoleh, bahwa semua data yang digunakan di dalam model, stasioner pada tingkat *first difference*.

Variabel-variabel independen yang digunakan di dalam model dimungkinkan untuk memiliki keterkaitan satu sama lain dengan tingkat yang cukup tinggi. Suatu model dikatakan terdapat multikolinieritas apabila nilai korelasi antar variabel independen lebih besar dari 0,80. Untuk mengetahui adanya multikolinieritas, dilihat dari hasil matriks koefisien korelasi.

Keterkaitan yang kuat akan menyebabkan model yang dihasilkan menjadi kurang baik. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengecekan multikolinieritas dengan menggunakan *corelation matrix*. Hasil pengujian multikolinieritas disajikan di dalam tabel 11.

Pada tabel 11 dapat dilihat tidak terdapat koefisien matriks korelasi yang bernilai 0, 80, sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam model tersebut tidak terdapat multikolinieritas.

Tabel 11. Hasil Uji Multikolinieritas Data (Correlation Matrix)

	Log FDI	GDP	Interest Rate	Trade	Inflation	Dummy Crisis
Log FDI	1.000000	-0.372018	0.027373	-0.291811	0.430419	-0.03697
GDP	-0.372018	1.000000	0.557277	0.227829	-0.734104	0.517373
Interest Rate	0.027373	0.557277	1.000000	-0.248640	-0.538001	-0.158313
Trade	-0.291811	0.227829	-0.248640	1.000000	-0.515652	0.125198
Inflation	0.430419	-0.734104	-0.538001	-0.515652	1.000000	-0.285862
Dummy Crisis	-0.036972	0.517373	-0.158313	0.125198	-0.285862	1.000000

Berdasarkan tabel di atas diperoleh hasil bahwa tidak terdapat keterkaitan yang cukup tinggi antara variabel, maka dapat dikatakan bahwa tidak terdapat masalah multikolinieritas dalam model.

FDI dan Konsekuensi Kebijakan

Pada uji critical value menemukan :

a. Pengaruh Pendapatan Perkapita (GDP Percap) terhadap FDI Inflows di Yunani Tahun 1981 – 2010

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk Pendapatan Perkapita adalah sebesar -1.893 dan pada t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$), $df = 16$ diperoleh 1,729 . Terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t kritis atas, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa Pendapatan perkapita Yunani berpengaruh secara signifikan terhadap FDI di Yunani.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0.07 atau probabilitas mendekati 0.05, maka H_0 diterima, namun demikian jika tingkat kepercayaan dinaikkan menjadi 0.10 (10 persen) maka H_0 ditolak. Artinya Pendapatan perkapita Yunani tahun 1981-2010 hanya berpengaruh pada tingkat kepercayaan 10 persen.

b. Pengaruh suku bunga terhadap FDI di Yunani 1980-2010

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk tingkat suku bunga sebesar 3,470 dan pada t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$), $df = 16$ diperoleh 1,729. Terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t kritis atas, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa tingkat suku bunga berpengaruh secara signifikan terhadap FDI di Yunani.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0.03 atau probabilitas di bawah 0.05, maka H_0 ditolak artinya

bahwa tingkat suku bunga benar-benar berpengaruh secara signifikan terhadap FDI di Yunani tahun 1981 – 2010.

c. Pengaruh volume perdagangan terhadap FDI Inflows di Yunani Tahun 1980-2010

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk volume perdagangan di Yunani sebesar 1,984 dan pada t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$), $df = 16$ diperoleh 1,729 . Terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t kritis atas, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa volume perdagangan berpengaruh secara signifikan terhadap FDI di Yunani.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0.06 atau probabilitas di atas 0.05, maka H_0 diterima artinya bahwa volume perdagangan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap FDI di Yunani tahun 1981-2010. Namun demikian, pada tingkat kepercayaan 90 % atau signifikan pada 0,10 (10 persen) maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa volume perdagangan berpengaruh secara signifikan.

d. Pengaruh tingkat inflasi terhadap FDI Inflows di Yunani Tahun 1980-2010

Dari hasil regresi diperoleh nilai t hitung untuk tingkat inflasi adalah sebesar 2,068 dan pada t tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$), $df = 16$ diperoleh 1,729 . Terlihat bahwa t hitung lebih besar dari t kritis atas, maka H_0 ditolak yang berarti tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap FDI di Yunani.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0,056 atau probabilitas sama dengan 0.05, maka H_0 ditolak

artinya bahwa tingkat inflasi berpengaruh secara signifikan terhadap FDI di Yunani tahun 1981 – 2010.

e. Pengaruh Variabel *Dummy* Krisis terhadap FDI Inflows Yunani tahun 1981–2010

Dari hasil regresi diperoleh nilai *t* hitung untuk *Dummy* krisis sebesar 2,906 dan pada *t* tabel dengan tingkat signifikansi sebesar 95 % ($\alpha = 5\%$), $df = 16$ diperoleh 1,729 . Terlihat bahwa *t* hitung lebih besar dari *t* kritis atas, maka H_0 ditolak yang berarti bahwa adanya krisis berpengaruh secara signifikan terhadap FDI di Yunani.

Berdasarkan probabilitasnya, maka jika probabilitas lebih besar dari 0.05 maka H_0 diterima dan jika probabilitas lebih kecil dari 0.05 maka H_0 ditolak. Dari hasil perhitungan diketahui *sig.* atau *significance* adalah 0.010 atau probabilitas jauh di bawah 0.05, maka H_0 ditolak artinya bahwa adanya krisis sangat mempengaruhi *FDI Inflows* di Yunani tahun 1981-2010.

Pada kenyataannya, terjadinya krisis keuangan di Yunani dan di Eropa mempengaruhi perekonomian secara menyeluruh dan berpengaruh signifikan pada *FDI Inflows* di Yunani.

Uji pengaruh simultan digunakan untuk mengetahui apakah variabel *independent* secara bersama-sama atau simultan mempengaruhi variabel *dependent*.

Uji Statistik secara serentak ditunjukkan oleh perbandingan nilai *F* hitung dengan *F* tabel. Nilai *F* tabel dengan $df = (k-1, n-k)$, dengan derajat kepercayaan sebesar 95 persen, adalah $F_{0,05, 5, 16}$ sebesar 2,81. *F* hitung 4,499 adalah jauh lebih besar dari pada *F* tabelnya. Ini berarti bahwa kelima variabel independen signifikan dalam menjelaskan *FDI* di Yunani periode Tahun 1981-2010.

Kriteria uji adalah $F\text{-hitung} > F\text{tabel}$, maka tolak H_0 dan $F\text{-hitung} < F\text{tabel}$, maka terima H_0 . Jika $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$ maka tolak H_0 artinya ada minimal satu parameter yang berpengaruh nyata terhadap keragaman variabel endogen atau signifikan secara statistik. Jika hasil yang didapat $F\text{-hitung} < F\text{-tabel}$ maka terima H_0 , artinya secara bersama variabel yang digunakan tidak bisa menjelaskan secara nyata keragaman dari variabel endogen.

Pembahasan Hasil Estimasi

Beberapa pengujian telah dilakukan sebelumnya ternyata menunjukkan bahwa model regresi yang digunakan sudah baik, terbebas dari penyakit asumsi Klasik. Interpretasi ekonomi dari persamaan yang diperoleh adalah:

1. Nilai konstanta sebesar -5,66 menunjukkan bahwa jika variabel-variabel independen dianggap konstan, pertumbuhan FDI mengalami penurunan rata-rata sebesar -5,66%. Angka sebesar itu dipengaruhi oleh variabel-variabel lain di luar model.
2. Koefisien dari variabel realisasi GDP adalah -0,00 dan nilai tersebut adalah negatif maka peningkatan GDP berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan FDI di Yunani secara signifikan. Jika GDP naik 1 persen, maka FDI Yunani turun -0,00 persen atau tetap. Hal ini disebabkan oleh tingginya konsumsi publik di Yunani yang dibiayai sebagian besar oleh anggaran fiskal.
3. Koefisien dari variabel suku bunga adalah 0,18 dan bernilai positif, maka peningkatan suku bunga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan FDI di Yunani secara signifikan. Jika suku bunga naik 1%, maka FDI bertumbuh sebesar 0,18% di Yunani.
4. Koefisien variabel perdagangan adalah 0,08 dan nilai ini adalah positif, maka pertumbuhan perdagangan berpengaruh positif terhadap peningkatan FDI di Yunani secara signifikan. Jika perdagangan naik 1%, maka FDI tumbuh 0,08% di Yunani.

5. Koefisien variabel dari tingkat inflasi adalah 0,10 dan bernilai positif, maka kenaikan tingkat inflasi berpengaruh positif terhadap peningkatan FDI di Yunani secara signifikan. Jika tingkat inflasi naik 1%, maka FDI Yunani mengalami kenaikan 0,10 %.
6. *Dummy Crisis* (DC) menunjukkan hasil yang signifikan pada level 1%. Variabel *dummy* ini menunjukkan bukti adanya perbedaan pengaruh antara masa sebelum krisis (1981-2002) dan masa sesudah krisis (2003-2010). Hasil signifikan dengan tanda negatif (-2,77) membuktikan bahwa pengaruh keadaan krisis signifikan perannya dalam model. Dengan menganggap semua variabel lain konstan, jika terjadi krisis maka tingkat pertumbuhan *FDI inflows* di Yunani akan tetap tumbuh sebesar +2,77%.

Keadaan krisis di Yunani yang ditandai dengan (i) Utang Pemerintah lebih dari 120 % dari GDP (ii) Menurunnya daya saing Yunani (iii) Meningkatnya kapasitas menganggur di berbagai sektor perusahaan di Yunani.

Oleh karena itu, Yunani harus tetap mempertimbangkan dan menjaga stabilitas *FDI inflows* sebagai bagian untuk mengabsorpsi krisis yang sampai sekarang ini masih belum ada tanda-tanda berhenti di zona euro.

Pada tabel 12 berikut ini, memperlihatkan integrasi Eropa (Uni Eropa) dan melemahnya pertumbuhan GDP rata-rata dalam periode krisis di beberapa negara UE terutama Yunani.

Tabel 12. Integrasi EU Integration dan Pertumbuhan GDP rata-rata (2009-2010)

Keanggotaan EU dan status Akses	Negara	Pertumbuhan GDP rata-rata (2009-2010)
EU Members	Bulgaria, Greece, Romania, Slovenia	-3.4
Candidate states	Croatia, Macedonia, Montenegro, Turkey	-1.3
Potential candidates	Albania, Bosnia and Herzegovina, Serbia	0.5

Sumber : Bank of Greece

Berkebalikan dengan tabel 12 di atas, bahwa dalam keadaan krisis, Yunani tetap memperlihatkan kecenderungan kenaikan nilai investasi (Tahun 2007 ke Tahun -2008), baik toatal FDI maupun net FDI nya, sebagaimana terlihat dalam tabel berikut ini. Pada tahun 2007 dan 2008 tanda-tanda krisis di Yunani telah ada.

Dalam periode krisis, volume FDI di Yunani selama semester pertama Tahun 2009 mencapai level yang memuaskan, lebih dari 1.7 billion Euro (Eurostat,2010).

Pada tabel 13 berikut ini, diperlihatkan perbandingan teori FDI dan bukti empiris yang diperoleh dari hasil analisa tentang faktor determinan FDI du Yunani.

Tabel 13. Faktor FDI, Perbandingan antara teori FDI dan bukti empiris kasus “Yunani”

FDI Determinan	Teori FDI dan bukti empiris	Kasus Yunani – Analisis dengan Data
Pertumbuhan ekonomi (GDP)	Ya	Ya
Upah tenaga kerja	Tidak	-
Inflasi	Tidak	Ya
Kapasitas SDM	Ya	-
Kondisi bisnis	Ya	
Tahap transisi ekonomi	Ya	Ya
Ukuran Pasar	Ya	-
Suku Bunga	Ya	Ya
Dummy Crisis	Ya	Tidak
Keterbukaan ekonomi (Openness)	Ya	Ya
Integrasi UE	Ya	Ya – melalui faktor-faktor yang tidak langsung

Di sisi lainnya, pada tabel 14 berikut ini, menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh signifikan antara krisis (krisis keuangan) dengan volume FDI di Yunani dan sebagaimana juga telah dibuktikan dalam persamaan dengan menggunakan analisis regresi.

Tahun	Total FDI Inflows	Net FDI Inflows
2005	3.16	0.50
2006	6.99	4.27
2007	4.61	1.40
2008	6.48	3.47

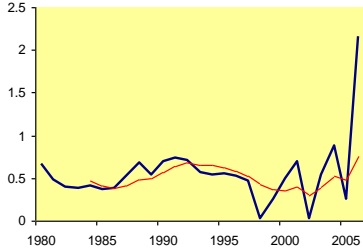
Tabel 14. Total dan Net FDI di Yunani (2005-2008)

Sumber : Bank of Greece; dalam billion Euro

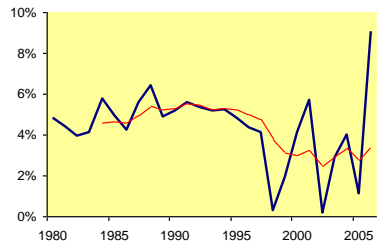
Tren peningkatan FDI Yunani dalam masa awal terjadinya krisis, juga mengalami peningkatan, sebagaimana terlihat dalam grafik 1 di bawah ini:

Grafik 1. Greece FDI Inflows

Inward FDI in Greece, 1980-2006
Flows- Billion USD (constant 1980 prices)



Inward FDI in Greece, 1980-2006
% of gross capital formation



Sources of Inward FDI in Greece (2001):
 European Union: 70% [~50% from Luxembourg and Holland]
 Other European countries: 16%
 United States: 7%

Sumber: Professor Kevin Featherstone Fragkiskos Filippaios, MEF Fellow Kostas Tzioumis, NBG Fellow , Hellenic Observatory Seminar Series February 12th, 2008

Daya Saing Yunani Versus UE Lainnya

Untuk melengkapi hasil analisis data kuantitatif di atas, penulis menambahkan kajian tentang daya saing Yunani dan prospek investasi di Yunani. Hal ini menjadi penting sebagai bahan untuk melihat posisi Yunani di masa yang akan datang sebagai basis negara yang menarik untuk dijadikan tempat berinvestasi.

Dalam teori ekonomi makro disebutkan bahwa investasi dipengaruhi oleh tingkat suku bunga. Ketika suku bunga naik, maka investasi akan turun, *ceteris paribus*. Alasannya sederhana: untuk melakukan investasi seseorang biasanya membutuhkan dana yang dipinjam dari lembaga keuangan dan suku bunga merupakan *cost of funds*. Atau, bila seseorang memiliki dana pribadi, maka suku bunga (dikalikan pokok) menjadi *opportunity cost* yang harus dikorbankan bila dana ini digunakan untuk belanja investasi. Karena, semakin tinggi tingkat bunga maka akan semakin besar keuntungan yang diperoleh bila dana ini ditempatkan dalam bentuk tabungan²⁵.

Di luar teori ekonomi yang sudah mapan di atas, telah berkembang pengertian yang luas di kalangan masyarakat bahwa investasi akan meningkat bila keyakinan investor meningkat. Keyakinan investor ini selanjutnya sangat dipengaruhi oleh kondisi institusi, infrastruktur, stabilitas ekonomi makro, kemampuan SDM, efisiensi pasar termasuk pasar tenaga kerja, sektor keuangan, teknologi, dan ukuran pasar.

²⁵ Teori makro juga mengatakan bahwa suku bunga berbanding terbalik dengan harga aset finansial seperti saham atau obligasi. Artinya, naiknya suku bunga akan diiringi oleh penurunan harga aset finansial sehingga menurunkan *capital gain*. Selain itu, teori ekonomi makro juga menyediakan hipotesis bahwa investasi akan meningkat sejalan dengan kenaikan nilai pasar perusahaan per biaya kapital perusahaan atau yang dikenal dengan *Tobin's q*.

Semua faktor-faktor ini terangkum dalam apa yang disebut sebagai competitiveness suatu perekonomian²⁶.

Dari 142 Negara yang disurvei dalam *Global Competitiveness Index* 2011-2012, Yunani menempati urutan ke 90. Tahun 2006-2007 (peringkat 61 dari 122 Negara).

Buruknya peringkat Yunani ini—relatif terhadap negara lain—disebabkan oleh tiga hal:

1. Stabilitas Ekonomi Makro
2. Efisiensi Pasar Tenaga Kerja
3. Kecanggihan Pasar Keuangan

Indikator-indikator ini Yunani menempati peringkat antara 110-140 dari 142 Negara.

Namun bila dilihat secara absolut, sebenarnya indeks pendidikan dan kesehatan Yunani cukup baik, yaitu sebesar 6,1 dari skala 1-7. Indeks terburuk terjadi pada stabilitas ekonomi makro (3,3), efisiensi pasar tenaga kerja (3,6), kecanggihan pasar keuangan (3,5) dan inovasi (3,0). (lihat Tabel 15 dan 16).

²⁶ *Competitiveness* didefinisikan sebagai serangkaian institusi, kebijakan dan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat produktivitas suatu negara (World Economic Forum, 2008).

**Tabel 15. Indeks Daya Saing Yunani, 2008-2009
PERBANDINGAN INDEKS DAYA SAING YUNANI PERIODE KRISIS
(2008-2009) & (2011-2012)**

Indikator	Peringkat (dari 134 Negara)	Skor (1-7)
GCI 2008 - 2009	67	4.1
GCI 2007 -2008 (dari 131 Negara)	65	4.1
GCI 2006-2007 (dari 122 Negara)	61	4.1
Basis Requirements	51	4.7
Pilar 1: Institusi	58	4.1
Pilar 2: Infrastruktur	45	4.3
Pilar 3: Stabilitas Ekonomi Makro	106	4.4
Pilar 4: Pendidikan Dasar & Kesehatan	40	5.9
Efficiency Enhancer (50.0%)	57	4.2
Pilar 5: Pendidikan Tinggi & Pelatihan	38	4.5
Pilar 6: Efisiensi Pasar Barang	64	4.2
Pilar 7: Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	116	3.9
Pilar 8 : Kecanggihan Pasar Keuangan	67	4.3
Pilar 9: Kesiapan Teknologi	59	3.5
Pilar 10: Ukuran Pasar	33	4.5
Innovation & Sophistication Factors (30.0%)	68	3.7
Pilar 11: Kecanggihan Usaha	66	4.1
Pilar 12: Inovasi	63	3.2

Tabel 16. Indeks Daya Saing Yunani, 2011-2012

Indikator	Peringkat (dari 142 Negara)	Skor (1-7)
GCI 2011 - 2012	90	3.9
GCI 2010 -2011 (dari 139 Negara)	83	4.0
GCI 2007-2008 (dari 131 Negara)	71	4.0
Basis Requirements (20.0%)	80	4.4
Pilar 1: Institusi	96	3.5
Pilar 2: Infrastruktur	45	4.5
Pilar 3: Stabilitas Ekonomi Makro	140	3.3
Pilar 4: Pendidikan Dasar & Kesehatan	37	6.1
Efficiency Enhancer (50.0%)	65	4.1
Pilar 5: Pendidikan Tinggi & Pelatihan	46	4.7
Pilar 6: Efisiensi Pasar Barang	107	3.9
Pilar 7: Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	126	3.6
Pilar 8 : Kecanggihan Pasar Keuangan	110	3.5
Pilar 9: Kesiapan Teknologi	47	4.2
Pilar 10: Ukuran Pasar	42	4.4
Innovation & Sophistication Factors (30.0%)	81	3.4
Pilar 11: Kecanggihan Usaha	77	3.8
Pilar 12: Inovasi	88	3.0

Sumber: World Economic Forum, Global Competitiveness Index 2008-2009 & 2011-2012

Menariknya, bila dilihat lebih detil per indikator, kalangan bisnis berpendapat bahwa satu-satunya hal yang lemah dalam indikator inovasi adalah paten. Begitu juga halnya dengan indikator pendidikan, dimana yang dianggap paling buruk adalah *enrollment* sekolah menengah dan universitas/akademi. Sementara itu untuk indikator infrastruktur, survei menunjukkan bahwa yang paling mengganjal bagi bisnis adalah kualitas pasokan listrik, pelabuhan, dan jalan. Namun untuk ketiga jenis infrastruktur ini Yunani memperlihatkan angka yang baik di peringkat 58-71 dari 142 Negara.

Selain itu, laporan yang sama juga menyebutkan bahwa hal yang paling problematis dalam menjalankan bisnis di Yunani adalah birokrasi pemerintah yang tidak efisien. Sebanyak 22,1 persen net responden mengatakan hal ini²⁷. Setelah itu disusul oleh aksesibilitas lembaga keuangan-akses pembiayaan (13.8 persen), korupsi (13 persen), dan regulasi pajak (11.8 persen).

Sekitar 8 persen net responden menilai regulasi tentang ketenagakerjaan dan aturan pajak menjadi faktor penghambat bisnis di Yunani. Bila kondisi-kondisi ini tidak dibenahi, bisnis apa pun akan cukup sulit memperoleh keuntungan di Yunani, *ceteris paribus*.

²⁷ Angka ini menunjukkan perbedaan proporsi responden yang mengatakan problematik dengan proporsi responden yang mengatakan tidak. Jadi, yang mengatakan problematik sebenarnya lebih besar daripada angka ini.

Prospek Investasi di Yunani

Meskipun ada permasalahan struktural seperti telah disebutkan sebelumnya, tabel 14 menunjukkan bahwa ukuran pasar Yunani yang besar menjadi hal yang paling *favorable* bagi bisnis, terlebih lagi dengan pasar Uni Eropa sebagai kekuatan ekonomi regional. Dengan populasi sebanyak 11,2 juta jiwa (UE:440 Juta Jiwa) dan GDP per kapita \$27,302 pada tahun 2010, yang diperkirakan ke depan akan terus tumbuh, Yunani merupakan pasar yang menarik. Ukuran pasar UE yang besar memungkinkan bisnis untuk mengeksploitasi *economies of scale* dalam produksi.

Permasalahannya adalah, apakah Yunani menjadi salah satu pilihan dari 27 Negara UE dan hanya menjadi target pasar ekspor negara lain, atau menjadi *production base* perusahaan lokal dan multinasional yang melayani pasar domestik sekaligus ekspor.

Bila *cost of doing business* di Yunani mahal, maka potential investors akan kehilangan insentif untuk melakukan produksi di Yunani kecuali terdapat sesuatu yang spesifik dan tidak dapat dicari di lokasi lain. Investor mungkin lebih memilih untuk menempatkan produksinya di Bulgaria atau di Negara UE lainnya.

Hal ini sangat mungkin terjadi, karena *cost of doing business across borders* disinyalir lebih rendah daripada *within border*. Selain itu perusahaan-perusahaan di berbagai Negara UE dapat memanfaatkan *economies of scale* dalam biaya transportasi dan logistik. Bila ini terjadi, tidak hanya Yunani gagal untuk menarik potential investors, tetapi sekaligus membuat keuntungan dari *existing companies* di dalam negeri mengecil karena persaingan dari barang impor²⁸.

²⁸ Prediksi ini mungkin tidak terlalu relevan bagi perusahaan multinasional yang memiliki *subsidiaries* di beberapa negara sekaligus.

Terkait dengan *cost of doing business*, Bank Dunia menyusun laporan *Doing Business* Juni 2011 yang mengukur kemudahan melakukan usaha di suatu negara. Dari 183 negara yang disurvei, Yunani menempati peringkat 100. Variabel-variabel yang menyusun indeks kemudahan melakukan bisnis mencakup 10 ukuran yaitu kemudahan dalam hal: (1) memulai usaha, (2) mendapatkan izin bangunan, (3) mempekerjakan pekerja, (4) mendaftarkan hak milik, (5) mendapatkan kredit, (6) mendapatkan perlindungan bagi investor, (7) pembayaran pajak, (8) berdagang antar negara, (9) menegakkan kontrak, dan terakhir (10) menutup usaha.

Meski secara keseluruhan kemudahan berbisnis di Yunani tidak terlalu menggembirakan, Yunani sebenarnya memiliki keunggulan dalam hal mendapatkan izin konstruksi/bangunan (peringkat 41), pembayaran pajak (peringkat 83), dan perdagangan antar Negara (peringkat 84).

Terkait dengan indikator yang perdagangan antar Negara, ternyata biaya yang dibutuhkan untuk melakukan perdagangan antar negara di Yunani ternyata lebih murah daripada rata-rata Negara-Negara UE lainnya. Informasi semakin menegaskan kesimpulan bahwa bila tidak disertai dengan kemudahan *doing business* lainnya, murah biaya perdagangan *cross border* ini dapat mendorong *potential* dan *existing investors* untuk hengkang, dan Yunani hanya menjadi basis pasar ekspor negara lain saja.

Intinya adalah, untuk menarik investasi dan membuat *the existing investment* untung, pasar yang besar harus disertai dengan daya beli yang tinggi, dan iklim bisnis dan investasi yang nyaman. Perubahan yang signifikan dan agresif diperlukan karena bila tidak dilakukan maka Yunani akan tertinggal. Di antara negara-negara UE lainnya, posisi indeks kemudahan melakukan usaha adalah Yunani tergolong

paling buruk di UE. Sedangkan Bulgaria peringkat 59, Republik Chezka 64, seperti terlihat pada tabel 17 di bawah ini.

Tabel 17. “Doing Business” di Yunani

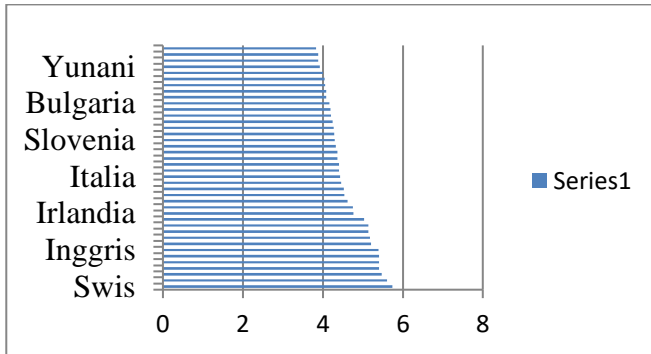
The most problematic factors for “doing business”	Tahun 2008-2009 (Percent of responses)	Tahun 2011-2012 (Percent of responses)
Inefisiensi Birokrasi Pemerintah	26.5	22.1
Aksesibilitas Ke Lembaga keuangan	3.0	13.8
Korupsi	12.0	13
Regulasi Pajak	15.6	11.8
Instabilitas Kebijakan	6.1	10.6
Tarif Pajak	6.5	8.5
Restriksi Kebijakan Pekerja	12.6	8.2
Ketidacukupan Infrastruktur	6.4	3.6
Undang-Undang Tenaga Kerja	2.0	3.2
Instabilitas Pemerintah/Wibawa Pemerintah	1.4	2.5
Regulasi Nilai Tukar	0.4	1.0
Ketidacukupan Berpengetahuan Pekerja	3.3	0.9
Inflasi	3.2	0.7
Kriminalitas & Perampokan	0.9	0.2
Masalah Kesehatan Publik	0.1	0.1

Sumber: The Global Competitiveness Report 2008-2009 © 2008 World Economic Forum

The Global Competitiveness Report 2011-2012 © 2011 World Economic Forum

Namun jika di bandingkan dengan peringkat daya saing Yunani dengan negara-negara dalam kawasan Eropa tidak terlalu buruk. Hal ini dapat dilihat pada grafik 2 berikut ini:

Grafik 2. Peringkat Daya Saing Yunani – Perbandingan dengan Negara sekawasan



Score Daya Saing:

Sangat Tinggi	: 5.51 to 7
Tinggi	: 4.51 to 5.50
Moderat	: 3.51 to 4.50
Rendah	: 3.01 to 3.50
Sangat Rendah	: 0 to 3.00

Source: World Economic Forum

<http://www.globalpropertyguide.com/Europe/Greece/competitivene>

ss

Bagian
Komitmen Uni Eropa

Untuk menjawab pertanyaan penelitian yang berkaitan dengan sisi politiknya, maka, pada bab ini, penulis memulainya dengan menguraikan struktur dan fungsi kelembagaan Uni Eropa dalam menjalankan ketentuan-ketentuan dan peraturan dasar UE, dilanjutkan dengan pembahasan atas kelemahan sistem keuangan yang digunakan oleh Uni Eropa dan mengakhirinya dengan memaparkan langkah-langkah dan komitmen yang telah dijalankan oleh Uni Eropa yang diikuti dengan prediksi atas skenario masa depan Uni Eropa pascakrisis di Yunani.

Pada bab ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang berkaitan dengan kriteria konvergensi kompatibilitas yang memuat komitmen Uni Eropa untuk keluar dari krisis.

Konsistensi Penerapan Peraturan Dasar (*Acquis communautaires*)

Uni Eropa adalah hasil dari proses yang telah dimulai lebih dari setengah abad yang lalu melalui pembentukan ECSC (European Coal and Steel Community) (Pinder & Usherwood, 2007, hal.1). Pembentukan komunitas Eropa bertujuan untuk mendamaikan Perancis dan Jerman setelah berperang selama kurang lebih delapan dekade. Partisipasi dalam sebuah organisasi Eropa bagi Jerman dapat membangun hubungan yang konstruktif dan damai dengan negara anggota lainnya (2007, hal.2).

Pada awal pembentukannya pada 1952 melalui Traktat Paris, Uni Eropa beranggotakan enam negara, yaitu Belanda, Perancis, Jerman, Luxemburg, Italia dan Belgia. Saat ini, jumlah negara anggota telah berkembang menjadi 27 negara anggota, dengan Denmark, Irlandia dan Inggris yang bergabung pada 1973, Yunani pada 1981, Portugal dan Spanyol pada 1986, Austria, Finlandia dan Swedia pada 1995. perluasan keanggotaan terbesar Uni Eropa terjadi pada 2004, dengan bergabungnya sepuluh negara, di antaranya adalah negara – negara pecahan Uni Soviet, yaitu Siprus, Republik Ceko, Estonia,

Hungaria, Latvia, Lithuania, Malta, Polandia, Slovakia dan Slovenia. Dua negara terakhir yang bergabung dengan Uni Eropa pada 2007 adalah Bulgaria dan Rumania.

Keanggotaan UE terbuka bagi setiap negara Eropa yang ingin menjadi anggota dengan dua persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu pertama, negara yang bersangkutan harus berada di benua Eropa, dan kedua, negara tersebut menerapkan prinsip-prinsip demokrasi, penegakan hukum, penghormatan HAM dan menjalankan segala peraturan perundangan UE (*acquis communautaires*).

UE adalah suatu kelembagaan yang mengikat (*legally binding*) yang ditunjukkan dengan berbagai tahapan integrasi mulai dari Traktat Paris sampai dengan Traktat Lisabon. (Tabel 18).

Tahun	Traktat
1951	Treaty of Paris (ECSC)
1957	Treaty of Rome (EEC)

Tabel 18. Traktat-Traktat Uni Eropa

1986	Single European Act
1992	Treaty of Maastricht (EU)
1997	Treaty of Amsterdam
2001	Treaty of Nice
2004	Constitutional Treaty (failed)
2007	Treaty of Lisbon

Uni Eropa (UE) memiliki tiga bentuk Undang – Undang yang dikenal dengan *Acquis Communautaire*²⁹, yaitu:

1. Primary Legislation → Traktat – Traktat Uni Eropa dan Traktat yang dibuat antara UE dengan negara non UE.
2. Secondary Legislation → terdiri dari direktif, regulasi, keputusan, rekomendasi dan opini yang didasarkan atas Traktat – Traktat.
3. Tertiary Legislation → Case Law dari European Court of Justice dan Court of First Instance.

Secondary Legislation disusun oleh Komisi Eropa berdasarkan pasal – pasal dalam Traktat, yang lalu menjadi dasar hukum bagi keputusan ataupun Undang – Undang yang akan dibuat. *Secondary Legislation* terdiri atas:

- Direktif (*Directives*) → sifatnya mengikat bagi seluruh negara anggota. Direktif harus diratifikasi ke dalam legislasi nasional sesuai dengan prosedur yang berlaku di setiap negara anggota. Pemberlakuan di negara anggota merupakan tanggung jawab pemerintah nasional. Negara diberi batas waktu (*time limit*) untuk proses ratifikasi namun diberi kebebasan untuk menggunakan metode yang dianggap cocok dengan situasi mereka.

²⁹ “*The EU’s Acquis Communautaire*”. Diakses dari www.parliament.uk/briefing-papers/SN05944.pdf. “*Acquis Communautaire*” berasal dari bahasa Prancis “*acquis=achieved* (pencapaian)”, “*Communautaire=of the community* (dari komunitas)”.

- Regulasi (*Regulations*) → sifatnya mengikat dan langsung diterapkan di semua negara anggota tanpa diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam hukum nasional, dan negara anggota memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa regulasi tersebut diaplikasikan di negaranya.
- Keputusan (*Decisions*) → bersifat mengikat bagi yang ditujukan, contohnya individu, perusahaan, atau negara anggota.
- Rekomendasi dan Opini (*Recommendations and Opinions*) → tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat negara anggota Uni Eropa, biasanya berupa pandangan yang dikeluarkan institusi tertentu dari Uni Eropa³⁰.

Uni Eropa memiliki tiga institusi utama, yaitu:

1. Komisi Eropa
2. Dewan Menteri Uni Eropa
3. Parlemen Eropa

Komisi Eropa adalah badan eksekutif Uni Eropa yang bertugas mewakili kepentingan Uni Eropa secara keseluruhan. Tugas Komisi Eropa secara garis besar adalah menyusun Rancangan Undang – Undang dan memprakarsai kebijakan baru, mengawasi negara – negara anggota dalam pelaksanaan kebijakan, menyusun dan melaksanakan kebijakan anggaran Uni Eropa, implementasi kebijakan dan manajemen program – program Uni Eropa, serta memformulasikan dan menegosiasikan aspek – aspek tertentu dari hubungan eksternal Uni Eropa (Pinder & Usherwood, 2007, h. 51).

Council of the European Union, atau biasa disebut Dewan Menteri bersama dengan Parlemen Eropa, merupakan lembaga legislatif Uni

³⁰ Artikel 288 Traktat Lisabon: “*To exercise the Union’s competence, the institutions shall adopt regulations, directives, decisions, recommendations and opinions. A regulation shall have general application. It shall be binding in its entirety and directly applicable in member states. A directive shall be binding, as to the result to be achieved, upon each Member State to which it is addressed, but shall leave to the national authorities the choice of form and methods. A decision shall be binding in its entirety. A decision which specifies those to whom it is addressed shall be binding only on them. Recommendations and opinions shall have no binding force.*”

Eropa. Mereka bertugas menyetujui Rancangan Undang – Undang yang diprakarsai Komisi Eropa (Pinder & Usherwood, 2007, h. 40). Tugas utama Parlemen Eropa adalah menyetujui Rancangan Undang – Undang dari Komisi Eropa. Tugas ini dibagi bersama dengan Dewan Menteri, yang biasa disebut *co-decision* yang diperkenalkan dalam Traktat Maastricht. Tugasnya yang lain adalah penunjukkan dan pembubaran anggota Komisi Eropa³¹. Mereka juga memiliki kekuasaan untuk mengontrol anggaran dan mengawasi penggunaannya. Parlemen Eropa dipilih secara langsung pada bulan Juni setiap lima tahun sekali oleh masyarakat Eropa untuk mewakili kepentingan mereka.

Dari mulai berdiri pada 1952 hingga kini, Uni Eropa memiliki enam Traktat, yaitu Traktat Paris (1952), Traktat Roma (1958), Traktat Maastricht (1993), Traktat Amsterdam (1999), Traktat Nice (2003) dan Traktat Lisabon (2009)³². Traktat yang kini berlaku adalah Traktat Lisabon, yang ditandatangani di Lisabon pada 13 Desember 2007 dan efektif berlaku mulai 1 Desember 2009³³.

Tujuan utama ditandatanganinya Traktat Lisabon adalah membuat Uni Eropa menjadi semakin demokratis, efisien dan mampu untuk menghadapi isu global. Salah satu fitur yang mengalami reformasi penting yang membedakan Traktat Lisabon dengan trakta – traktat sebelumnya adalah pembagian kompetensi antara Uni Eropa dan negara anggota³⁴.

³¹ *“allowing Parliament both to vote on the Commission President-designate and on the Commission as a whole; the Amsterdam Treaty formally approved Parliament’s veto over the President-designate.” (Scully, 2003, h.170)*

³² *“EU Treaties”*. Diakses dari http://europa.eu/about-eu/basic-information/decision-making/treaties/index_en.htm

³³ *Taking Europe into the 21st Century*”. Diakses dari http://europa.eu/lisbon_treaty/take/index_en.htm

³⁴ *“Division of Competences within the European Union”*. Diakses dari http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0020_en.htm

Dalam Traktat Lisabon, pembagian dibuat lebih jelas dan tegas, karena pada traktat – traktat sebelumnya masih terdapat konflik dan komplikasi dalam membedakan antara kompetensi negara anggota dan Uni Eropa. Dalam Traktat Lisabon, kompetensi ini dibagi dengan lebih jelas, yaitu:

1. Kekuasaan yang mutlak milik Uni Eropa (*exclusive competences*), diatur dalam Artikel 3 Traktat Lisabon yang isinya “*the EU alone is able to legislate and adopt binding acts in these fields. The Member States’ role is therefore limited to applying these acts, unless the Union authorizes them to adopt certain acts themselves.*”
2. Kekuasaan yang mutlak menjadi wewenang negara anggota, maka dalam hal ini Uni Eropa memiliki *supporting competences* yang sifatnya mendukung kebijakan negara anggota, diatur dalam Artikel 6 Traktat Lisabon yang bunyinya, “*the EU can only intervene to support, coordinate or complement the action of Member States. Consequently, it has no legislative power in these fields and may not interfere in the exercise of these competences reserved for Member States*”.
3. Kekuasaan yang dibagi antara Uni Eropa bersama negara anggota (*shared competences*), diatur dalam Artikel 4 Traktat Lisabon yang bunyinya, “*the EU and Member States are authorised to adopt binding acts in these fields. However, member States may exercise their competence only in so far as the EU has not exercised, or has decided not to exercise, its own competence*”³⁵.

Tabel 19. Pembagian Kompetensi dalam Traktat Lisabon

Exclusive Competence	Supporting Competence	Shared Competence
Pajak bersama, Peraturan persaingan yang terkait dengan pasar	Perlindungan dan peningkatan kesehatan, Industri,	Pasar bersama, Kebijakan social, Kepaduan ekonomi, social

³⁵ “*Division of Competences within the European Union*”. Diakses http://europa.eu/legislation_summaries/institutional_affairs/treaties/lisbon_treaty/ai0020_en.htm pada 26 April 2012.

bersama, Regulasi moneter bagi negara anggota yang menggunakan mata uang Euro, Perlindungan sumber daya alam dari laut yang diatur dalam kebijakan perikanan bersama, Kebijakan komersial bersama.	Budaya, Turisme, Pendidikan, Pelatihan, pemuda dan olah raga, Perlindungan bagi warga sipil, Kerja sama administrasi.	dan wilayah, Pertanian dan perikanan (tidak termasuk didalamnya perlindungan sumber daya dari laut), Lingkungan, Perlindungan konsumen, Transportasi, Jaringan Trans-Eropa, Energi, Area kebebasan, Keamanan dan keadilan, Keprihatinan bersama atas isu kesehatan publik
---	--	---

Berdasarkan tabel 19 di atas, kompetensi Uni Eropa dan Negara anggota dalam bidang fiskal belum termasuk di dalam “exclusive competence”. Keadaan di Uni Eropa sampai dengan saat ini menghadapi masalah fiskal terkait dengan tingginya rasio utang terhadap perndapatan perkapita mencapai 120 %, khususnya Yunani.

Kriteria Copenhagen, Kriteria Adopsi Euro dan Kriteria Konvergensi Traktat Maastricht

Kriteria Copenhagen dan Kriteria Adopsi Euro

Kriteria Copenhagen adalah faktor penentu dan peraturan yang memuat syarat bagi negara anggota kandidat untuk menjadi anggota UE. Kriteria ini terdiri dari kriteria politik, ekonomi dan institusional sebagaimana terangkum dalam tabel 20 berikut ini:

Tabel 20. Kriteria Copenhagen

Kriteria	Subkriteria
1. Politik	Stabilitas berlangsungnya pemerintahan demokrasi, hak asasi manusia, negara hukum, perlindungan terhadap kaum minoritas di UE
2. Ekonomi	Keberadaan berfungsinya ekonomi pasar, dan jaminan adanya kompetisi sehat dalam berusaha bagi semua pihak di UE
3. Institusional	Jaminan semua institusi politik dan ekonomi mengadopsi, mengimplementasikan dan menegakkan kriteria politik dan ekonomi yang berlaku bagi semua negara anggota dalam UE, termasuk jaminan dilakukannya legislasi European Community (EC) ke dalam hukum nasional untuk kemudian diimplementasikan dan efektif diberlakukan, serta mengikat semua anggota UE. Dalam hal legislasi EC ini, termasuk di dalamnya adalah kriteria konvergensi kompatibilitas (kriteria adopsi euro) yang diterapkan bagi anggota UE yang ingin di terima di zona euro. Jadi, kriteria institusional dalam Copenhagen Criteria adalah berkelindan dengan kriteria konvergensi kompatibilitas dalam kriteria adopsi euro.

Sumber: http://europa.eu/scadplus/glossary/accession_criteria_copenhagen_en.html
http://europa.eu/economy_finance/int_economic_issues/enlargement196_en.html
(diringkas)

Setelah suatu negara dinyatakan diterima sebagai anggota UE, mereka juga tetap diharuskan menjalankan Copenhagen Kriteria ini. Berikutnya, mereka diharuskan telah memenuhi kriteria adopsi euro (kriteria konvergensi ekonomi, kompatibilitas dan faktor lain), sebagaimana terlihat pada tabel 21 di bawah ini:

Dengan demikian, negara anggota zona euro dipastikan telah memenuhi *Copenhagen* kriteria dan kriteria adopsi euro. (lihat tabel 21).

Tabel 21. Kriteria Adopsi Euro

Kriteria	Sub-kriteria	Keterangan
Konvergensi Ekonomi	Konvergensi dalam hal tingkat inflasi, defisit/surplus anggaran dan utang pemerintah, suku bunga jangka panjang, serta nilai tukar mata uang	Pasal 121 (1), paragraph 1-4 Traktat Maastricht (the EC Treaty) tentang kriteria konvergensi
Konvergensi Kompatibilitas	Kompatibilitas statuta bank sentral nasional dengan EC Treaty dan Protokol Statuta ECBC dan ECB. Kompatibilitas ini khususnya pada jaminan independensi bank sentral nasional, integrasi legal bank sentral nasional ke dalam ESCB dan faktor lainnya seperti provisi untuk penerbitan banknotes dan coins, pengelolaan foreign reserve dan kebijakan nilai tukar mata uang.	Kompatibilitas statuta bank sentral nasional dengan EC Treaty dan Protokol Statuta ESCB secara mendasar diatur dalam pasal 108 dan 109 Traktat Komunitas Eropa (EC Treaty) dan Protokol ESCB dan ECB
Faktor lain	Perkembangan ECU dan neraca pembayaran serta biaya tenaga kerja perunit, hasil integrasi pasar dan tingkat harga-harga lainnya.	Pasal 121 (1) Traktat Maastricht (the EC Treaty)

Sumber: Laporan Konvergensi oleh EMI (ECB) 1998, 2000, 2002, 2004, 2006, 2008. Ketiga kriteria dan semua sub-kriteria di atas dipantau dan dinilai oleh Komisi Eropa dan EMI (sejak 1 Juni 1998, EMI digantikan oleh ECB).

Kriteria Konvergensi Ekonomi Traktat Maastricht

Selain dua kriteria yang telah disebutkan pada sub bab sebelumnya, terdapat pula Kriteria Konvergensi Traktat Maastricht.

Di dalam Traktat Maastricht terdapat kriteria nominal yang berisi sejumlah indikator ekonomi tertentu yang harus dipenuhi oleh masing – masing anggota di satu sisi. Di sisi lain, terdapat kriteria riil yang tidak dicantumkan dalam Traktat Maastricht yang dapat dijadikan suatu indikator sejauh mana kriteria nominal konvergensi ekonomi yang sudah dicapai para anggota akan mencerminkan kesejahteraan rakyat mereka dalam jangka panjang.

Pada satu sisi, kriteria nominal konvergensi ekonomi itu adalah tingkat inflasi, suku bunga jangka panjang, dan nilai tukar (indikator moneter), serta defisit atau surplus anggaran negara dan utang publik (indikator fiskal). Pada sisi lain, kriteria riil konvergensi ekonomi ada tiga ukuran. *Pertama*, ukuran maksimum tingkat pengangguran yang ditolerir untuk Negara anggota adalah 7% demi alasan aspek sosial sebagaimana direkomendasikan oleh *Delors Report*. *Kedua*, ukuran posibilitas dari *Unit Labor Costs* (ULC), yakni nisbah penghasilan terhadap produktivitas. Ukuran ULC ini direkomendasikan oleh John Major (eks perdana menteri Inggris). *Ketiga*, ukuran tingkat pertumbuhan GDP sebagaimana diusulkan oleh Spanyol. Ketiga ukuran ini akhirnya tidak disepakati oleh UE-12 sehingga dia tidak dimasukkan ke dalam Traktat Maastricht (1992)³⁶.

Selain kriteria nominal, ada juga kriteria riil konvergensi ekonomi. Kriteria riil ini tidak disepakati oleh UE-12 pada waktu penandatanganan Traktat Maastricht (1992). Meskipun demikian, dia tetap perlu diperhitungkan guna mengukur sejauh mana para warga UE secara riil telah mencapai tingkat kesejahteraan dalam jangka panjang.

³⁶ Untuk lengkapnya baca, Ramon Tamames, Loc. Cit., hal. 49.

Ukuran riil yang dijadikan patokan antara lain tingkat pertumbuhan riil GDP per kapita, hasil dari perkembangan integrasi pasar, dan tingkat kesempatan kerja.

Gaspar (2001)³⁷ berargumen kriteria riil adalah hasil (*outcome*) dari pencapaian kriteria nominal. Hal ini berarti saat tingkat inflasi stabil dikendalikan, dia akan berimbas positif kepada stabilitas nilai tukar, rendahnya suku bunga jangka panjang, defisit anggaran negara, dan utang pemerintah. Semua kondisi yang tercipta ini akan mendorong masuknya arus **investasi** sehingga pertumbuhan ekonomi akan positif. Pertumbuhan positif ini akan meningkatkan pendapatan riil masyarakat.

Oleh karena itu, kondisi terakhir ini adalah mencerminkan (bentuk) kriteria riil konvergensi. Sebagai tambahan, guna mengukur riil konvergensi ekonomi di antara UE-15, Soukiazis dan Castro (2005)³⁸ menggunakan standar hidup, produktivitas, investasi, dan tingkat pengangguran di UE-15. Berdasarkan data tahun 1970-2011, keduanya memilih parameter evolusi dari pendapatan per kapita, output per pekerja, porsi investasi, dan kinerja pekerja serta tingkat pengangguran sebagai proksi untuk standar hidup, produktivitas, investasi, dan tingkat pengangguran di UE-15.

Syarat perlu lain yang harus dipenuhi oleh negara-negara anggota UE untuk dapat diterima kedalam zona euro adalah kriteria konvergensi komparabilitas³⁹. Konvergensi ini bermakna semua legislasi nasional termasuk statuta bank sentral nasional negara kandidat zona euro harus kompatibel dengan *pertama*, pasal 108 dan 109 EC Treaty, serta

³⁷ P. Gaspar, "Real and Nominal Convergence of Pre-Accession Economies and the Choice of Exchange Rate Regime," ECE and BUE, 2001,

<http://www.icegec.org/research/ACE/papers/aceconvergence.pdf>.

³⁸ Elias Soukiazis dan Vitor Castro, "How the Maastricht Criteria and the Stability and Growth Pact affected the convergence process in the European Union. A panel data analysis," Faculty of Economics, University of Coimbra, Portugal (2005), Diunduh dari http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=989582.

³⁹ Hanspeter K Scheller, Loc. Cit., kotak 6 di hal. 37.

kedua, Statuta ESCB dan ECB. Kompatibel di sini diartikan dihilangkannya inkonsistensi legislasi statuta bank sentral nasional negara kandidat terhadap kedua hal itu, khususnya dipenuhi syarat bahwa bank sentral nasional negara kandidat harus independen dalam hal institusinya, tugasnya sebagai bagian yang terintegrasi dengan ESCB, status legalnya, independensinya secara fungsional dan badan pembuat keputusan.

Dengan demikian, ada tiga hal yang harus diperhatikan agar diterima kedalam zona euro (kriteria adopsi euro), yakni syarat perlu (*necessary condition*): konvergensi nominal ekonomi, dan konvergensi kompabilitas, serta syarat cukup (*sufficient condition*): faktor lain (konvergensi riil ekonomi).

Ringkasan kriteria nominal konvergensi ekonomi dalam Traktat Maastricht terlihat seperti tabel 22 di bawah ini:

Tabel 22. Kriteria Konvergensi Traktat Maastricht

Kriteria Nominal	Nilai Referensi	Dalam Traktat Maastricht
Tingkat Inflasi	1,5% plus nilai rerata inflasi dari tiga negara anggota terendah (tingkat inflasi terbaik)	<i>Article 121 (1), first indent</i>
Defisit anggaran negara	3 % dari GDP	<i>Article 104 (2) dan (3)</i>
Utang pemerintah	60 % dari GDP	<i>Ibid</i>
Suku bunga jangka panjang	2 % plus nilai rerata nominal suku bunga jangka panjang dari 3 negara anggota yang mencapai tingkat inflasi terendah	<i>Article 4 of the Protocol on the Convergence Criteria dengan merujuk pada the fourth indent of Article 121 (1)</i>
Stabilitas nilai tukar	Tidak terjadi devaluasi di antara negara anggota, rentang margin fluktuasi nominal nilai tukar + - 2, 25 %	<i>Article 3 of the Protocol on the convergence criteria dengan merujuk pada the third indent of Article 121 (1)</i>

Dimensi Politik

Dimensi politik yang terjadi antara lain adalah peristiwa Jerman yang tidak dikenai denda meskipun dia melewati nilai referensi defisit anggaran publik (3%) pada tahun 2005. Pada tahun⁴⁰ itu, Jerman mengalami tekanan perekonomian cukup berat yang ditandai dengan menurunnya aktivitas ekonomi di sektor otomotif, manufaktur dan konstruksi akibat melonjaknya harga minyak dunia. Turunnya aktivitas ketiga sektor membawa konsekuensi meningkatnya angka pengangguran di Jerman. Dalam rangka memperkecil dampak pengangguran yang terjadi, Pemerintah Jerman melonggarkan belanja anggaran negaranya hingga menjadi 3,5%. Langkah ini dapat dipahami karena dalam masa resesi, kebijakan fiskal yang ekspansif dapat mengurangi tekanan ekonomi dan pengangguran dalam jangka pendek.

Dimensi politik lainnya adalah dukungan terhadap empat⁴¹ Negara, yaitu Yunani, Slovenia, Siprus dan Malta yang diterima sebagai anggota zona euro pascatahun 1999. Dimensi politik yang terjadi pada keempat Negara tersebut sebenarnya telah berlangsung sebelumnya, yakni pada saat mereka berupaya melakukan aksesi ke dalam UE.

⁴⁰ Pada tahun 2005, defisit anggaran publik Jerman adalah 3,5%, tetapi Jerman tidak dihukum denda sebagai mana seharusnya pada saat itu. Baca, *The Economist*, "The Battle of the Bridge", *the European Union's Finance*, *The Economist*, 5 March 2005, hal 99, London. Selain itu, selama kurun waktu 2002-2003, Jerman dan Perancis juga melanggar aturan defisit anggaran publik, namun keduanya tidak dikenai denda. Kritikan terhadap tidak pernah dijatuhkannya sanksi bagi anggota zona euro yang melewati nilai referensi defisit anggaran (3%), dikemukakan juga oleh Torres, Verdun dan Zimmermann. Baca, Francisco Torres, Amy Verdun, dan Hubert Zimmermann, "Introduction," dalam *Governing EMU Economic, Political, Legal and Historical Perspective*, European University Institute, European Central Bank, European Investment Bank, July 2004, hal. 10.

⁴¹ Proses aksesi empat Negara merujuk pada tulisan R.J. Crampton (1997), Michelle Cini (2001), Commission of the European Communities (1999), European Parliament (1999) dan CIA World Factbook (2008).

Yunani diterima sebagai anggota UE pada tahun 1981, dan zona euro pada tahun 2001. Ada sejumlah dimensi politik yang muncul sebelum Yunani diterima kedalam UE, dan zone euro. Beberapa diantaranya adalah dukungan politik dari Italia dan Jerman agar Yunani diterima sebagai anggota UE dan zona euro. Jika ditelusuri dari sejarah, faktor politik ini mempunyai alasan kuat karena Italia pernah menduduki Yunani pada tahun 1941, dan Jerman selama tahun 1941-1944. Karena kedua Negara ini terlebih dulu diterima sebagai anggota UE dan mereka mempunyai pengaruh besar di dalam UE, maka adalah wajar Yunani didukung keduanya untuk diterima sebagai anggota UE (1981) dan zona euro (2001) di satu sisi.

Di sisi lain, letak Yunani di sebelah Eropa juga menjadi pertimbangan UE untuk menerima Yunani. Hal ini agar UE sebagai sesuatu entitas geogografis menjadi kokoh pertahanannya di selatan Eropa. Lagipula, Yunani adalah anggota NATO sejak tahun 1952 sehingga tidak ada alasan cukup cukup kuat bagi UE untuk tidak menerima Yunani sebagai anggotanya. Sebagai tambahan, Yunani diterima kedalam UE juga karena faktor sejarah. Faktor ini dapat dilihat dari kejayaan Yunani di masa lalu yang telah membawa Eropa ke level tinggi di bidang pengetahuan, olahraga dan pemerintahan demokratis. Aristoteles, misalnya, adalah seorang Yunani tetap memengaruhi dunia hingga sekarang karena antalain konsep pemerintahan demokrasi yang dibuatnya. Selain itu, Athena adalah kota pertama yang menyelenggarakan Olimpiade, dan hingga sekarang Olimpiade menjadi peristiwa terpenting di dunia olahraga.

Oleh karena itu, bagi Eropa, Yunani menyimpan warisan sejarah Eropa yang tidak ternilai harganya. Akibatnya, Yunani sangat wajar diterima sebagai anggota UE. Adapun diterima Yunani sebagai anggota zona euro (2001) juga tidak terlepas dari pengaruh Jerman dan Italia yang mendukungnya melalui bantuan Dana Struktural Eropa (ESF) sehingga Yunani dapat memenuhi kriteria konvergensi ekonomi dalam traktat Maastricht.

Kebijakan Fiskal dalam *Monetary Union*

Penyebab utama krisis utang zona euro adalah ketidaktaatan terhadap pertauran yang di amanahkan dalam kriteria konvergensi dari *European Monetary Union* (EMU), longgarnya pengawasan dan tidak adanya kredibilitas, sebagaimana telah ditunjukkan pada sub bab sebelumnya.

Yunani bukan negara pertama dalam zona euro yang melakukan pelanggaran yang diamanahkan dalam Traktat Maastricht. Hal ini dapat dilihat beberapa fakta atas pelanggaran Traktat Maastricht oleh beberapa negara dalam zona euro, adalah sebagai berikut:

1. Perancis dan Jerman melanggar aturan yang ada di dalam SGP (*Stability and Growth Pact*)- lihat tabel 23, namun tidak pernah mendapatkan sanksi.
2. Pemerintah Yunani sebelum terjadinya krisis, memanipulasi data-data anggaran dan juga tidak diberi sanksi.
3. Sektor perbankan dan pasar keuangan zona euro tidak mengenal "klausul bail-out" dalam otoritas European Central Bank (ECB) dan tetap memberikan pinjaman kepada negara anggota zona euro yang perifer (*new member states*) dengan tingkat bunga yang sama seperti negara-negara inti (*old member states*), padahal negara anggota zona euro yang perifer memiliki lebih banyak risiko.

**Tabel 23. *The Stability and Growth Pact (SGP)*
“Pakta Stabilitas dan Pertumbuhan”**

	“SGP” diadopsi oleh EU Pada Tahun 1997	Proses Ketahanan Anggaran
Pada dasarnya SGP untuk memberi penguatan kepada Kriteria Konvergensi	Dirancang untuk fokus pada pertumbuhan dan menjaga disiplin anggaran (defisit), namun tidak berjalan sebagaimana mestinya.	<p>Negara anggota harus melaporkan data ekonomi dan kebijakannya secara periodik.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. “Mekanisme Peringatan Dini” (<i>Early warning mechanism</i>) bagi negara anggota yang terancam krisis. b. “Komitmen Politik” memaksakan “peer pressure” pada negara anggota untuk menghormati komitmen mereka. c. “Prosedur defisit berlebihan” dengan “elemen dissuative” jika suatu negara gagal melaksanakan “tindakan perbaikan” dalam menangani defisit.

Penyebab lain krisis utang zona euro adalah minimnya mekanisme penjaminan dalam *European central bank* (ECB) yang ditandai dengan:

1. Tidak ada lembaga pemberi jaminan dan tidak berfungsinya ECB sebagai *the lender of last resort* seperti fungsi bank sentral secara umum.
2. Tidak ada fungsi pengawasan terhadap bank-bank komersial.

3. Terlalu percaya diri terhadap mekanisme SGP Uni Eropa dan menganggap bahwa ketaatan terhadap SGP akan terbebas dari masalah di kemudian hari. Padahal krisis akan selalu ada. ECB tidak menyiapkan “pemadam kebakaran” di saat terjadinya kebakaran⁴².
4. *Contagion effect* yang kegagalan bank dalam satu negara anggota menciptakan krisis perbankan baru di negara-negara anggota lainnya.

Selain itu, krisis utang zona euro disebabkan oleh gagalannya kebijakan ekonomi di negara-negara zona euro perifer yang masuk ke *European Monetary Union* (EMU) karena menurunkan tingkat suku bunganya. Hal ini menyebabkan (i) tingginya pinjaman di sektor publik karena suku bunga murah (lebih mudah untuk meminjam karena murah) (ii) naiknya upah sektor swasta (daya saing rusak) (iii) revaluasi nilai tukar riil (murahnya impor yang menyebabkan defisit transaksi berjalan) (iv) tingkat bunga yang lebih rendah dari Jerman (terutama di Spanyol dan Irlandia) untuk sektor properti yang menyebabkan gelembung properti.

Sorensen dan Yosha (1998) menjelaskan bahwa kerapuhan euro karena tidak ditopang oleh pasar modal, pasar uang, dan lembaga fiskal yang terintegrasi. Sebelum euro diterapkan, sejumlah ekonom telah menunjukkan bahwa pasar modal zona euro hanya akan mampu menghalau tekanan sebesar 8,0 persen, pasar uang sebesar 7,0 persen dan otoritas fiskalnya hanya sekitar 3,0 persen. Sementara 82 persen dari tekanan tersebut tidak dapat dijinakkan yang selanjutnya menyebabkan krisis.

Lebih lanjut, pasar modal berperan dalam proses diversifikasi portofolio antar negara bagian, yaitu pelaku ekonomi di negara

⁴² Lihat De Grauwe (2010), mekanisme “kehancuran ekonomi” Eurozone di *Intereconomics* 2010, Feensta, R.C. dan A.M. Taylor 2008, *International Economics*, 1st ed. New York : Worth Publishers.

bagian yang mengalami krisis dapat bertransaksi di negara bagian lainnya yang sedang *booming* untuk mempertahankan pendapatan dan konsumsinya. Demikian juga dengan pasar uang berperan memfasilitasi *lending* dan *borrowing* antar negara bagian. Sementara otoritas fiskal memfasilitasi transfer fiskal ke negara bagian yang mengalami krisis.

Zona euro tidak memiliki lembaga fiskal bersama seperti lembaga fiskal pemerintah federal di AS yang dapat menjadi penyanggah bagi negara bagian yang mengalami krisis.

Daya tahan perekonomian AS menghadapi krisis *subprime mortgage* tahun 2008 sebagai krisis terparah sejak tahun 1930 karena ditopang oleh tiga hal, yaitu: integrasi pasar modal, pasar uang, dan keberadaan otoritas fiskal yang mempersatukan semua negara bagian. Setiap institusi di atas berperan menopang dollar AS yang hingga hari ini masih terjaga perannya sebagai mata uang internasional (Sorensen dan Yosha, 1998).

Dalam hal krisis ekonomi AS, pada saat mengalami tekanan ekonomi, maka 49 persen dari tekanan tersebut dapat diabsorpsi melalui pasar modal, 14 persen melalui transfer fiskal antar negara bagian, dan 19 persen melalui pasar uang. Sementara hanya 18 persen dari tekanan tersebut yang tidak dapat diabsorpsi (Asdrubali dkk., 1996).

Selain itu, terdapat perdebatan tentang kebijakan fiskal dalam suatu kesatuan moneter antara lain (i) apakah kebijakan fiskal dalam *monetary union* harus dibatasi sebagaimana yang diamankan dalam SGP (Stability and Growth Pact) yang diadopsi Uni Eropa pada tahun 1997 (ii) memberikan fleksibilitas kepada setiap negara anggota (iii) koordinasi di tingkat Uni Eropa.

Zervoyianni et al. merekomendasikan lima pendekatan dalam menetapkan kebijakan fiskal dalam suatu kesatuan moneter, sebagai berikut⁴³:

1. Pendekatan Optimum Currency Area (OCA)⁴⁴
2. Pendekatan dinamika eksternalitas atas utang yang berkelanjutan
3. Pendekatan eksternalitas atas defisit pemerintah
4. Pendekatan disiplin fiskal
5. Pendekatan “Game theory”

⁴³ Kelima pendekatan yang dikemukakan oleh Zervoyianni et al. tidak akan diuraikan dalam tesis ini karena bukan merupakan fokus pembahasan.

⁴⁴ Dalam literatur OCA disebutkan bahwa negara anggota dalam serikat moneter tidak boleh dibatasi dalam menentukan batas defisit dan utang karena telah di atur dalam kebijakan moneter secara umum. Lebih lanjut, pembatasan defisit akan mengakibatkan ketidakmampuan dalam menyesuaikan nilai tukar antara satu dengan yang lainnya. Kebijakan fiskal dalam *monetary union* hanya dapat digunakan dalam situasi krisis dan situasi “*asymmetric shock*”. Kebijakan fiskal dalam kesatuan moneter harus bersifat independen dan fleksibel. (Mundell)

Masa Depan Yunani & Skenario Uni Eropa

Pilihan Yunani yang lain adalah keluar dari zona euro. Dari sisi fiskal, jika suatu Negara bukan anggota dari unifikasi moneter, maka terdapat kesempatan yang lebih besar untuk mengelola defisitnya antara lain dengan meningkatkan jumlah uang beredar, meninggalkan euro dan kembali ke mata uang drachma.

Dengan mata uang drachma, Yunani akan dapat menggunakan devaluasi sebagai instrumen kebijakan untuk meningkatkan daya saing perekonomiannya di pasar dunia.

Dalam jangka pendek, keluarnya Yunani dari zona euro (Grexit) akan menimbulkan masalah bagi perekonomian Yunani sendiri ataupun kreditor di lingkungan zona euro. Nilai aktiva ataupun pasiva perbankan, dunia usaha, dan sektor negara perlu diredenominasikan ke mata uang baru, drachma. Demikian juga kontrak antar-sesama pelaku ekonomi ataupun penetapan tingkat upah dan harga yang berlaku di dalam negeri. Kreditor yang memberikan pinjaman ke Pemerintah Yunani akan mengalami kerugian dari *hair cut* utang negara. (Vrije Universiteit Brussel;2012)

Tingkat bunga di negara-negara krisis meningkat tajam dan harga obligasi negara merosot drastis, sementara nilai tukar euro terhadap dollar AS kian melemah. Proses penyesuaian ini akan menimbulkan resesi lebih dalam, kebangkrutan dunia usaha, pengangguran, inflasi, dan utang luar negeri melambung tinggi, terutama di Yunani. Resesi akan kian dalam karena keluar dari zona euro sama saja menutup akses ke pasar bersama Eropa (Vrije Universiteit Brussels, 2012).

Christian Schulz (2010) menyatakan dalam hal Yunani keluar dari zona euro, maka semua utang Yunani akan dikonversikan ke mata uang Yunani, drachma. Bank Sentral Yunani akan terpaksa mendevaluasikan drachma 50-70 persen. Lebih buruk lagi, Bank

Sentral Yunani akan sangat kesulitan dan dapat bangkrut akibat pelarian modal dari Yunani.

Sebaliknya, jika tergabung dalam *monetary union*, maka satu-satunya cara mengelola defisit keuangan adalah melalui pinjaman (dalam jangka pendek menerbitkan obligasi pemerintah)⁴⁵

Hasil analisis kuantitatif menunjukkan bahwa pengaruh GDP dalam pertumbuhan FDI di Yunani menunjukkan hasil yang signifikan. Ini berarti bahwa, Yunani perlu memperbaiki iklim investasi di masa yang akan datang dengan terlebih dahulu mengikuti berbagai program penyesuaian di masa krisis.

Dari sisi politik, Yunani perlu menjalankan secara berkelanjutan komitmen Uni Eropa dalam mengatasi krisis zona euro. Komitmen yang telah dilaksanakan UE adalah sebagai berikut:

1. Pemberian dana talangan (*bail-out*) secara bertahap sebesar € 180 bn untuk Yunani selama 3-tahun yang sedang dinegosiasikan.
2. Penciptaan Fasilitas Stabilitas Keuangan Eropa/ *European Financial Stability Facility* (EFSF) sampai tahun 2013 dengan komitmen (i) Sebesar € 440bn (Catatan: jumlah ini hanya cukup untuk menjembatani kesenjangan pembiayaan hingga 2014 untuk Portugal, Irlandia dan Yunani). Lembaga ECB harus mengupayakan dana talangan untuk Spanyol dan Italia jika terkena dampak krisis di kemudian hari. (ii) Menyetujui pinjaman IMF sebesar € 250 milyar (iii) Desain EFSF dengan tingkat bunga 6% berbanding 3% untuk negara inti untuk menghindari resiko gagal bayar.
3. Pembentukan lembaga mekanisme Stabilitas Eropa / *European Stability Mechanism* (ESM) untuk menggantikan kedudukan EFSF.

⁴⁵ Lihat : Myeulink “Unsustainable debt dynamics approach” (Fiscal Policy in Monetary Union); Dytianquin University of Maastricht :2010)

4. Fasilitas *bail-out* harus diikuti oleh pengenaan pajak di negara-negara inti untuk ikut menanggung biaya dan pengawasan terhadap perbankan untuk berhati-hati dalam menyalurkan kredit.

Lebih lanjut, pada bulan Oktober 2011, pemimpin zona euro menyetujui paket penyelamatan untuk mencegah penularan lebih lanjut dari, krisis utang Yunani, Irlandia dan Portugis ke Spanyol dan Italia. Paket penyelamatan terdiri dari € 1 triliun dan khusus untuk Yunani sebesar € 130 milyar melalui peningkatan peran EFSF. 50% dari utang Yunani dihapus dengan mensyaratkan bank-bank Eropa untuk meningkatkan kapitalisasi sebesar 9%.

Namun demikian, kontras dengan program penyelamatan Uni Eropa, PM Yunani mengumumkan referendum untuk konstituen Yunani. Jika *bail-out* tidak disetujui dan Pemerintah Yunani melakukan langkah-langkah penghematan yang didukung oleh sektor publik Yunani, kemungkinan Yunani akan keluar dari zona euro.

Sampai dengan saat ini, krisis Eropa belum ada tanda-tanda berhenti. Bahkan berbagai skenario bermunculan antara lain:

Pertama, Skenario optimis yaitu rencana paket Uni Eropa berhasil dengan restrukturisasi utang atau semuanya kembali normal, tidak ada restrukturisasi utang atau gagal bayar.

Kedua, skenario pesimistis yaitu disintegrasi zona euro atau keluarnya Yunani dari Uni Eropa yang mungkin saja terjadi jika tidak ada dukungan politik untuk memperpanjang dan memperluas rencana penyelamatan dan menerima keterlibatan ECB. Skenario ini juga dimungkinkan apabila terjadi devaluasi terus menerus terhadap mata uang euro yang menyebabkan penularan krisis ke negara anggota lainnya.

Seperti di jelaskan di atas, untuk mengatasi krisis Eropa dan menutup kemungkinan skenario pesimistis maka yang harus dilakukan adalah implementasi penyesuaian secara terus menerus yang harus mendapatkan dukungan dari negara inti dan menutup kemungkinan gagal bayarnya Yunani yang dapat menyebabkan *contagion effect* dan akhirnya terjadi disintegrasi di zona euro.

Harapan rasional terhadap situasi yang terjadi di zona euro dapat dihindari dengan meningkatkan intervensi European Central Bank (ECB) dan merancang pembagian beban antara negara-negara anggota melalui kapitalisasi besar atau melakukan koordinasi fiskal yang lebih besar melalui keputusan untuk bergerak menuju federal atau serikat fiskal⁴⁶.

⁴⁶ Lihat Valiante (2011) Center for European Policy Studies (CEPS) Policy brief No. 251

**Bagian
Inferensi**

Simpulan

Dari hasil analisis dan pembahasan mengenai pengaruh pendapatan perkapita, suku bunga, inflasi dan perdagangan terhadap FDI di Yunani tahun 1981-2010 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang mempengaruhi FDI di Yunani (Y) selama tahun pengamatan 1981-2010 adalah : (i) pendapatan perkapita (ii) suku bunga (iii) tingkat inflasi (iv) perdagangan. Hasil analisis terhadap keempat variabel tersebut menunjukkan hubungan yang positif dan signifikan, kecuali variabel GDP dengan koefisien negatif dan signifikan. Sedangkan penambahan variabel *dummy* krisis, juga menunjukkan hasil yang sama yaitu pengaruh yang positif dan signifikan terhadap FDI di Yunani.
2. Adanya krisis zona euro sejak tahun 2008 tidak menyebabkan perbedaan yang nyata antara keadaan sebelum dan sesudah terjadinya krisis keuangan ekonomi. *Vice versa*, memberikan dampak yang positif / tetap atau sekurang-kurangnya tidak menyebabkan penurunan kapasitas output. Oleh karena itu, model krisis yang terjadi di zona euro harus tetap mengandalkan FDI dalam jangka panjang.
3. Yunani membutuhkan reformasi dan sistem ekonomi yang terbuka agar stabilitas pembangunan jangka panjang dapat tercapai. Yunani dapat memulai perbaikan ekonomi dengan menarik investasi yang bersifat jangka panjang. Salah satu instrumennya adalah meningkatkan volume investasi asing langsung (FDI) ke Yunani. Keuntungan FDI adalah tidak terpengaruh oleh gejolak keuangan yang bersifat jangka pendek. Hal ini telah dibuktikan dalam analisis persamaan.
4. Krisis zona euro harus menjadi pelajaran berharga bagi komunitas Asean yang sedang menuju integrasi ekonominya secara penuh (benchmark UE). Penyatuan mata uang tidak kuat menahan gejolak ekonomi jika hanya ditopang oleh integrasi moneter. Mata uang tunggal akan menjadi kuat jika juga ditopang oleh unifikasi fiskal (prioritas fiskal).

5. Uni Eropa membutuhkan Fiskal Union (federalisme Fiskal), untuk mencapai tahapan integrasi yang lebih dalam (level tinggi) yaitu integrasi dari serikat moneter ke serikat fiskal (federalisme fiskal). Diperlukan otoritas fiskal tunggal untuk menangani kebijakan fiskal seperti kebijakan European Central Bank (ECB) menangani moneter. Serikat fiskal dapat melengkapi kekurangan dari *Stability and Growth Pact* (SGP) untuk menghindari segala macam krisis di masa depan.
6. Untuk mencegah terjadinya siklus krisis di masa yang akan datang, UE harus tegas dan konsisten dalam penerapan berbagai peraturan dasar yang telah ditetapkan dalam struktur kelembagaan UE, termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan dasar (*aquis communautaire*), Traktat-Traktat dan Regulasi mengikat lainnya.

Dari hasil analisis baik Ekonomi maupun politik, beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan volume FDI di Yunani berikut berbagai usulan untuk keluar dari zona krisis adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan penelusuran dokumen (metode kualitatif), penulis menyarankan ke satu institusi supranasional di level Eropa untuk bidang fiskal. Hal ini dapat ditempuh secara bertahap seperti tahapan dalam unifikasi moneter.
2. Uni Eropa perlu melakukan tahapan pendalaman dan konsolidasi baik dalam perspektif pendalaman tahapan integrasi (*deepening*) maupun rencana penambahan anggota UE (*widening*) serta mendorong integrasi pada level tinggi. Sebaiknya perluasan keanggotaan untuk sementara ditangguhkan (*moratorium*). Hal ini disebabkan oleh adanya disparitas dan kesenjangan yang signifikan antara negara inti (*old members*) dengan negara perifer (*new members*).
3. Pemerintah Yunani diharapkan dapat mengagregasi FDI dalam jangka panjang, selain karena FDI tidak rentan gejolak jangka

pendek, FDI dapat diandalkan dalam mengabsorpsi krisis karena dapat meningkatkan pendapatan Negara.

4. Selain itu, permasalahan zona euro dapat diatasi di masa depan dengan meningkatkan volume FDI dan tidak Yunani tidak boleh hanya menggantungkan anggaran publik dari sisi kekuatan fiskal semata.
